

EKSA4104
Edisi 1

MODUL 01

Konsep Dasar dan Filsafat Ekonomi Makro Islam

Dr. Ida Ariyani, S.S., M.M.

Daftar Isi

Modul 01	1.1
Konsep Dasar dan Filsafat Ekonomi Makro Islam	
Kegiatan Belajar 1	1.4
Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro dalam Islam	
Latihan	1.32
Rangkuman	1.33
Tes Formatif 1	1.35
Kegiatan Belajar 2	1.38
Perbedaan Ekonomi Makro Islam dengan Ekonomi Makro Konvensional	
Latihan	1.65
Rangkuman	1.66
Tes Formatif 2	1.67
Kegiatan Belajar 3	1.69
Filsafat Ekonomi Makro Islam	
Latihan	1.89
Rangkuman	1.90
Tes Formatif 3	1.91
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.93
Daftar Pustaka	1.94



Pendahuluan

Dalam Modul 1 ini akan dibahas mengenai Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam, yaitu membahas apa itu ekonomi Islam? Apakah definisi Ekonomi Makro Islam menurut Ekonomi Islam? Apa saja yang menjadi ruang lingkup Ekonomi Makro Islam? Mengapa ilmu ekonomi dibedakan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro menurut Islam? Apa konsep dasar ekonomi makro, baik konvensional, maupun dalam Islam berbagai filsafat ekonomi makro. Untuk memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas maka pembahasan dibagi dalam tiga kegiatan belajar, yaitu: (1) Perbedaan Ekonomi Makro dan Mikro dalam Islam, (2) Perbedaan Ekonomi Makro Islam dengan Ekonomi Makro Konvensional, dan (3) Filsafat Ekonomi Makro Islam. Dalam tiap kegiatan belajar dilengkapi dengan uraian materi, konsep, rumus, contoh, tabel, latihan, rangkuman, dan tes formatif untuk menguji kemampuan Anda terhadap kompetensi yang telah disajikan.

Setelah mempelajari modul ini, secara khusus Anda dapat menjelaskan:

1. definisi Ekonomi Islam;
2. definisi Ekonomi Makro Islam;
3. ruang lingkup Ekonomi Makro Islam;
4. perbedaan antara Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro dalam Islam;
5. konsep dasar Ekonomi Makro Konvensional dan Dalam Islam;
6. berbagai filsafat Ekonomi Makro Islam.

Tips mempelajari Modul 1

Pelajari modul ini dengan cara membaca modul secara cermat dan seksama, pelajari juga kompetensi khusus yang ingin dicapai maka Anda akan berhasil, usahakan untuk membuat catatan kecil.

Selamat Belajar Semoga Sukses...

Semangat sehat senang sukses selalu...

Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro dalam Islam

Dalam Kegiatan Belajar 1 ini, kita akan membahas tentang apa ilmu ekonomi itu, dan ilmu ekonomi itu untuk siapa Ekonomi Islam? Mengapa kita mempelajari ilmu ekonomi? Bagaimana? Istilah apa yang digunakan dalam ilmu ekonomi?

A. DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

Sumber utama ekonomi Islam adalah Alquran dan As-Sunnah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya berdasarkan pada hal-hal yang bersifat *positivistic*. Ekonomi itu jihad dan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh ke luar dari konsep dan syarat-syarat ibadah. Islam lebih menekankan pada konsep *need* daripada *want* dalam menuju *mashlahah* karena *need* lebih bisa diukur daripada *want*. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat. (QS. 25: 63).

Pengertian ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam Rukun Iman dan Rukun Islam. Kata “Islam” setelah kata “ekonomi” dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa memengaruhi makna atau definisi dari ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi *worldview* yang digunakan sebagai landasan nilai. Sedangkan, ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantaranya manusia sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat (*hereafter*). Ekonomi adalah aktivitas yang kolektif.

Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.

Pada saat ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun demikian secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu *kapitalisme* dan *sosialisme*. Sistem-sistem yang lain seperti *welfare state*, *state capitalism*, *market socialisme*, *democratic socialism* pada dasarnya bekerja pada

bingkai kapitalisme dan sosialisme. Akan tetapi, sejak runtuhnya Uni Soviet, sistem sosialisme dianggap telah tumbang bersama runtuhnya Uni Soviet tersebut. Dalam konteks tulisan ini, maksud ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi kapitalisme yang hingga kini masih menjadi sistem ekonomi kuat di dunia.

1. Pengertian Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

Perbedaan pandangan dari para tokoh ekonomi Islam menyangkut pengertian ekonomi Islam atau pengertian ekonomi *Syariah* pada dasarnya berakar pada tiga masalah utama, yakni: *pertama*, metodologi yang dipakai dalam membangun ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. *Kedua*, perbedaan dalam penafsiran konsep ekonomi seperti penafsiran makna *khilafah* dan implikasi kepemilikan. *Ketiga*, perbedaan tafsiran bangunan sistem ekonomi.

Beberapa pakar ekonomi Islam mengidentifikasi pengertian ekonomi Islam atau pengertian ekonomi *Syariah* untuk melengkapi tentang pemahaman ekonomi Islam sebagai berikut.

- a. **Yusuf Qardhawi**, menyatakan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan pada Ketuhanan. Esensi dari sistem ekonomi ini, yaitu bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari *syari'at* Allah.
- b. **Nejatullah ash-Shiddiqi**, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan atau respons para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada manusia tertentu. Dalam hal ini, mereka dituntun oleh Alquran dan Sunnah serta akal (pengalaman dan *ijtihad*).
- c. **M. Metwally**, menyebutkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku *Alquran*, *Hadist*, *Ijma*, dan *Qiyas*.
- d. **Umer Chapra**, pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan *syari'ah* (*al-'Iqtisad al-Syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.
- e. **Syauqi Al-Faujani**, pengertian ekonomi Islam adalah segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran agama Islam tentang ekonomi.
- f. **Ziauddin Ahmad** seorang ekonom yang berasal dari Pakistan, merumuskan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridha-Nya.

- g. **Khursid Ahmad**, pengertian ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.
- h. **Abdul Mannan**, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam.
- i. **M. Hasanuzzaman**, pengertian ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.
- j. **Akram Khan**, pengertian ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.
- k. **Louis Cartori**, pengertian ekonomi Islam adalah upaya dalam merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksek individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.
- l. **Veithzal dan Andi Buchari**, pengertian ekonomi Islam adalah sebagai suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional. Dengan ilmu tersebut manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan.

Ada tiga sistem ekonomi yang dikenal di dunia, yaitu Sistem Ekonomi Sosialis/Komunis, Sistem Ekonomi Kapitalis, dan Sistem Ekonomi Islam. Masing-masing sistem ini mempunyai karakteristik.

Pertama, Sistem Ekonomi Sosialis/Komunis. Paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia sehingga negara ikut campur cukup dalam dengan perannya yang sangat dominan. Akibatnya, adalah tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu-individu, melainkan semuanya untuk kepentingan bersama sehingga tidak diakuinya kepemilikan pribadi. Negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat.

Kedua, Sistem Ekonomi Kapitalis. Berbeda dengan sistem komunis, sistem ini sangat bertolak belakang dengan sistem Sosialis/Komunis, ketika negara tidak mempunyai peranan utama atau terbatas dalam perekonomian. Sistem ini sangat menganut sistem mekanisme pasar. Sistem ini mengakui adanya tangan yang tidak kelihatan yang ikut campur dalam mekanisme pasar apabila terjadi penyimpangan (*invisible hand*). Yang menjadi cita-cita utamanya adalah adanya pertumbuhan ekonomi sehingga setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan diakuinya kepemilikan pribadi.

Ketiga, Sistem Ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam hadir jauh lebih dahulu dari kedua sistem yang dimaksud di atas, yaitu pada abad ke-6, sedangkan kapitalis abad 17, dan sosialis abad 18. Dalam sistem ekonomi Islam, yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan seperti tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terima lah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan lah, dan bertakwa lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Jika berbicara tentang nilai dan etika dalam ekonomi Islam, terdapat empat nilai utama, yaitu **Rabbaniyyah (Ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan, dan Pertengahan**. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi Ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Atas dasar itu, sangat nyata perbedaannya dengan sistem ekonomi lainnya.

Ekonomi Rabbaniyyah bermakna ekonomi Islam sebagai *Ekonomi Ilahiah*. Pada Ekonomi Kapitalis semata-mata berbicara tentang materi dan keuntungan terutama yang bersifat individual, duniawi, dan kekinian. Islam mempunyai cara, pemahaman, nilai-nilai ekonomi yang berbeda dengan Ekonomi Barat buatan manusia yang sama sekali tidak mengharap ketenangan dari Allah dan tidak mempertimbangkan akhirat sama sekali. Seorang muslim ketika menanam, bekerja, atau pun berdagang, dan lain-lain adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika mengonsumsi dan menikmati berbagai harta yang baik menyadari itu sebagai rezeki dari Allah dan nikmat-Nya, yang wajib disyukuri sebagaimana dalam firman Allah surat Saba ayat 15. Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kepada mereka dikatakan): "*Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun*".

Seorang muslim tunduk kepada aturan Allah, tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak akan melakukan yang riba, tidak melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, tidak akan menipu, tidak akan berjudi, tidak akan mencuri, tidak akan menyuap dan tidak akan menerima suap. Seorang muslim tidak akan melakukan pemborosan, dan tidak kikir.

Ekonomi Akhlak, dalam hal ini tidak adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak. Islam tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kegiatan yang berkaitan dengan akhlak terdapat pada langkah-langkah ekonomi, baik

yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, dan konsumsi. Seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengembangkan, maupun menginfakkan hartanya.

Ekonomi Kemanusiaan, merupakan kegiatan ekonomi yang tujuan utamanya adalah merealisasikan kehidupan yang baik bagi umat manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Selain itu, bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya. Nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam seperti nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan, keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut, persaudaraan, dan saling mencintai, dan saling tolong menolong di antara sesama manusia. Nilai lain, menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah. Di antara buah dari nilai tersebut adalah pengakuan Islam atas kepemilikan pribadi jika diperoleh dari cara-cara yang dibenarkan syariat serta menjalankan hak-hak harta.

Ekonomi Pertengahan, yaitu nilai pertengahan atau nilai keseimbangan. Pertengahan yang adil merupakan ruh dari ekonomi Islam, dan ruh ini merupakan perbedaan yang sangat jelas dengan sistem ekonomi lainnya. Ruh dari sistem kapitalis sangat jelas dan nampak pada pengultusan individu, kepentingan pribadi, dan kebebasannya hampir-hampir bersifat mutlak dalam pemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta. Ruh sistem ekonomi komunis tercermin pada prasangka buruk terhadap individu dan pemasangan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Komunis memandang *kemaslahatan* masyarakat, yang diwakili oleh negara, adalah di atas setiap individu dan segala sesuatu.

Ciri khas *Pertengahan* ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai pasangan lainnya seperti dunia-akhirat, jasmani-rohani, akal-rohani, idealisme-fakta, dan lainnya.

2. Prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar Ekonomi Islam mempunyai beberapa prinsip dasar, sebagai berikut.

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemikiran pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

- f. Seorang muslim harus taat kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*).
- h. Islam melarang *riba* dalam segala bentuk.

Thomas Khun menyatakan bahwa setiap sistem ekonomi mempunyai inti paradigma. Inti paradigma Ekonomi Islam bersumber dari Alquran dan Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai *Ekonomi Rabbani dan Insani*. Disebut *Ekonomi Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiyah*. Sedangkan *Ekonomi Insani* karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. (Qardhawi).

Menurut Yusuf Qardhawi (2004), ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar, yaitu *tauhid, akhlak, dan keseimbangan*. Dua prinsip yang pertama, kita sama-sama tahu pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun, dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang. Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai *Ekonomi Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Sedangkan menurut Chapra, disebut sebagai *Ekonomi Tauhid*. Keimanan mempunyai peranan penting dalam Ekonomi Islam karena secara langsung akan memengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Saringan moral bertujuan untuk menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasikan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut, yang akan meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial. (Nasution dkk).

Dengan mengacu kepada aturan *Ilahiah* maka setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Pada paham naturalis, sumber daya menjadi faktor terpenting dan pada paham monetaris menempatkan modal finansial sebagai yang terpenting. Dalam Ekonomi Islam sumber daya insani lah yang terpenting.

Karakteristik Ekonomi Islam bersumber pada Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas *akidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah)*.

Ada beberapa karakteristik Ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-Ilmiah Wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah* yang dapat diringkas sebagai berikut.

- a. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta
Karakteristik pertama ini terdiri atas 2 bagian, yaitu
Pertama, semua harta, baik benda, maupun alat produksi adalah milik Allah SWT, firman Q.S. Al-Baqarah ayat 284 dan Q.S. Al-Maai'dah ayat 17.
Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 7.

Selain itu, terdapat sabda Rasulullah SAW, yang juga mengemukakan peran manusia sebagai *khalifah*, diantara sabdanya "Dunia ini hijau dan manis". Allah telah menjadikan kamu *khalifah* (penguasa) di dunia. Karena itu, hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini.

Dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya milik Allah, akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya.

Sesungguhnya Islam sangat menghormati milik pribadi, baik itu barang-barang konsumsi, atau pun barang-barang modal. Namun, pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

Pada QS. An-Najm ayat 31 dan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa ayat 32, dan QS. Al-Maa'idah ayat 38, jelas lah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walau hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan tentu saja tidak bertentangan pula dengan ajaran Islam. Sementara dalam sistem kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sedangkan dalam sistem sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan oleh negara.

b. Ekonomi Terikat dengan Akidah, *Syariah* (hukum), dan Moral

Diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam (Yafie, 2003: 41-42) adalah larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat, larangan melakukan penipuan dalam transaksi, larangan menimbun emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang, larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

c. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu, para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia). Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat.

d. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan umum

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk

kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyajahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

e. Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas, baik secara perorangan, maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT dalam Alquran maupun Al-Hadis. Dengan demikian, kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak.

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma *ukhrawi*, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

f. Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat, baik secara individu, maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau pun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara. Sebaliknya, juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.

g. Bimbingan Konsumsi

Islam melarang orang yang suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Israa ayat 16.

h. Petunjuk Investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyahwa-Al Amaliyah Al-Islamiyah* memandang ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi sebagai berikut.

- 1) Proyek yang baik menurut Islam.
- 2) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
- 3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
- 4) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
- 5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

i. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

j. Larangan *Riba*

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (*riba*). Ada beberapa pendapat lain mengenai karakteristik ekonomi Islam, diantaranya dikemukakan oleh Marthon (2004,27-33). Menurutnya, hal-hal yang membedakan ekonomi Islam secara operasional dengan ekonomi sosialis maupun kapitalis seperti berikut.

- 1) Dialektika Nilai-nilai Spritualisme dan Materialisme.
- 2) Kebebasan berekonomi.
- 3) Dualisme Kepemilikan.

3. Ciri Ekonomi Islam

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari kebutuhan berekonomi. Kebutuhan berekonomi meliputi kebutuhan produksi, konsumsi, distribusi, dan jasa. Kebutuhan berekonomi ini ternyata juga diatur oleh *syariah* Islam. Sehingga muncul lah disiplin ilmu Ekonomi Islam, yakni ilmu ekonomi yang dijalankan berdasarkan *syariah* Islam.

Berikut ini adalah ciri-ciri Ekonomi Islam.

Pertama, bersumber dari *syariah* Islam. Ciri sekaligus karakteristik *pertama*, dari ekonomi Islam adalah bersumber dari *Alquran* dan *Hadits* sebagai rujukan *syariah* Islam. *Alquran* dan *Hadits* adalah *nash* (*dalil naqli* berupa ayat suci) yang tidak mungkin bisa diubah lagi. Dalam penafsiran dan implementasinya yang membutuhkan pemikiran manusia dalam kapasitasnya sebagai ulama. Hal ini disebut dengan *istinbath* hukum. Ulama menentukan hukum-hukum atas peristiwa yang baru terjadi (sebelumnya belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan Sahabat). Siapa dan ulama mana yang layak dan kredibel melakukan *istinbath* hukum dalam kondisi *muamalah* kontemporer saat ini?

Tentu saja dengan mudah kita bisa menyimpulkan bahwa pihak yang layak melakukan *istinbath* hukum adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain karena merupakan representasi dari Umat Islam di Indonesia, MUI juga merupakan Ulama Dewan (berbagai ulama berkumpul, berdiskusi, ber-*ijtihad* sehingga menghasilkan fatwa yang bisa dijadikan sebagai pedoman hukum masyarakat kontemporer sekarang ini.

Saat ini sudah ada total 110 fatwa MUI yang khusus membahas *Lembaga Keuangan Syariah* (LKS). Fatwa tersebut ada sejak tahun 2000 hingga saat ini. Sebagai acuan atas operasional seluruh Lembaga Keuangan Syariah, implementasi fatwa ini dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang secara struktur legal formal ada pada setiap LKS.

Sementara, pada lembaga nonprofit seperti *zakat* dan *wakaf* juga ada sistem audit dalam pelaksanaan dan penyaluran dana yang dikumpulkan. Bahkan lembaga zakat sudah menjadi bagian dari lembaga negara dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini ada lembaga negara baru bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merujuk pada UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Lembaga ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan, apalagi dana yang dikelola sudah mencapai Rp100 triliun.

Kedua, menghindari transaksi terlarang. Setiap lembaga ekonomi dalam bentuk LKS, pasti sudah diatur secara legal formal untuk melakukan transaksi dagang dan menghindari transaksi yang dilarang *syariah* Islam.

Di antara transaksi yang dilarang *syariah* Islam meliputi transaksi berbasis *riba*, transaksi *gharar* (memastikan hal yang tidak pasti atau menidakpastikan hal yang pasti), transaksi *maisir* (spekulasi terlarang), transaksi penipuan, transaksi suap, transaksi yang *zhalim* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya), transaksi maksiat, serta transaksi yang tidak terpenuhi rukun dan syarat sah akadnya.

Sebagai contoh, sistem Ekonomi Islam dan LKS mana pun dilarang keras melakukan pembiayaan terhadap bisnis minuman keras dan bisnis rokok. Ini salah satu contoh khas dari Ekonomi Islam. Pada ekonomi yang tidak berlandaskan syariat Islam (misalnya pada lembaga keuangan konvensional), tidak ada larangan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki komoditas bisnis berupa minuman keras dan rokok.

Ketiga, transaksinya masuk akal. Salah satu ciri utama sistem Ekonomi Islam adalah transaksinya yang harus masuk akal. Jika ingin mengambil keuntungan maka harus melalui jual beli. Jika menjalankan transaksi motif nonprofit maka harus tidak boleh minta kelebihan dalam pengembalian.

Hal ini terlihat sangat jelas pada berbagai LKS seperti lembaga keuangan *syariah*, pegadaian *syariah*, asuransi *syariah*, pasar modal *syariah*, koperasi *syariah*, perusahaan pembiayaan *syariah*, dan lain-lain. Semua regulasi legal formal yang mengatur berbagai LKS tersebut mengatur bahwa semua LKS tersebut harus melakukan transaksi dagang (jual beli) jika ingin mengambil keuntungan. Contoh produknya adalah pembiayaan investasi. Dalam pembiayaan investasi, ketika usaha akan dilakukan maka yang disepakati adalah *nisbah* bagi hasilnya, yakni persen dikalikan hasil. Kepastian hasil akan menunggu sampai ada transaksi jual beli di sisi lain. Ini sangat masuk logika dagang. Contoh lain adalah pada KPR *syariah*. Tidak akan bisa ditemukan akad KPR *syariah* berbasis pinjaman. Semua akadnya harus merupakan akad dagang, baik berupa

jual beli barang, jual beli manfaat (biasanya melibatkan skema sewa menyewa) serta akad kongsi kepemilikan yang semuanya akan melalui akad jual beli.

Sementara itu, pada akad berbasis pinjaman maka tidak akan bisa ditemukan permintaan dan/atau perjanjian ada kelebihan dalam pengembalian. Anda bisa cermati baik-baik setiap detil akad/perjanjiannya.

Keempat, menjaga azas transaksi *syariah*. Ciri ekonomi Islam berikutnya adalah menjaga azas transaksi *syariah*. Azas transaksi *syariah* terdiri atas *kemaslahatan*, keseimbangan, persaudaraan, keadilan, dan universal.

Ekonomi Islam akan sangat memperhatikan *kemaslahatan*. Tentu saja dalam tolok ukur tidak akan melanggar aturan *syariah* Islam. Hukum Islam dalam ekonomi akan disesuaikan dengan kondisi *kemaslahatan* umat yang terjadi saat ini.

Ekonomi Islam juga akan memperhatikan keseimbangan antara material dengan nonmaterial, keseimbangan duniawi dan *ukhrowi*. Ekonomi Islam tidak melulu akan membahas hal yang sifatnya surga neraka, namun tetap sangat halal membahas transaksi motif profit. Tentu saja ada keseimbangan dalam dinamikanya.

Persaudaraan merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam bertransaksi ekonomi. Ekonomi Islam mementingkan juga sisi harmoni, sinergi, dan kekeluargaan. Terkait hal ini, ekonomi Islam juga bisa dijalankan oleh siapa pun di dunia ini, termasuk oleh nonmuslim, oleh karena adanya azas universalisme.

Berikutnya adalah azas keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah terkait dengan pelaksanaan transaksi ekonomi Islam yang tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang *syariah* Islam. Ekonomi Islam juga sangat menekankan penerapan azas *an taraadhin minkum* (rela sama rela), tentu saja setelah rukun dan syarat akad terpenuhi.

Kelima, menjaga *maqashid* ekonomi. Ada 5 *maqashid syariah* yang harus selalu dijaga dalam menjalankan praktik ekonomi Islam, yakni menjaga agama (*hifzh ad diin*), menjaga jiwa (*hifzh an nafs*), menjaga akal (*hifzh al aql*), menjaga harta (*hifzh al maal*), dan menjaga keturunan (*hifzh an nasl*).

Ekonomi Islam menegaskan adanya penjagaan agama, penjagaan terhadap ajaran agama, terutama dalam ranah *muamalah*. Menjaga agama dalam *muamalah* adalah terus menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak merupakan transaksi yang terlarang.

Ekonomi Islam juga diterapkan dalam rangka menjaga jiwa. Penjagaan jiwa ini bisa berupa penjagaan terhadap nyawa, adanya keamanan, kenyamanan, dan bisa juga menjaga jiwa dari sifat-sifat kotor seperti sombong, iri, dengki, dan sejenisnya. Dalam keseharian, praktik Ekonomi Islam harus selalu memperhatikan sisi rohani agar tetap terjaga.

Berikutnya adalah penjagaan terhadap akal. Alquran menyebutkan bahwa pemakan *riba* itu ibarat orang yang bangkit di hari akhir (orang yang berdiri) seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan dan hilang akal. Ekonomi *syariah* memastikan agar akal kita menjadi sehat. Rumus sederhana implementasinya adalah dengan

memastikan nominal transaksi yang seharusnya pasti dan menidakpastikan nominal transaksi yang seharusnya tidak pasti.

Di dalam hal penjagaan harta, Ekonomi Islam jelas sangat menunjukkan ciri khasnya. Dalam pengelolaan harta, Ekonomi Islam menegaskan adanya konsistensi penggunaan transaksi profit dan nonprofit. Ketika ingin motif profit maka harus siap dengan skema dan risiko transaksi motif profit. Begitu juga ketika menggunakan skema transaksi motif nonprofit maka harus siap tanpa profit.

Selanjutnya, sistem ekonomi Islam juga mengatur fungsi keberlanjutan hak dan kewajiban tata *muamalah* sampai pada penjagaan keturunan. Ketika kita menjalankan transaksi bisnis maka hal ini bisa berdampak pada keturunan kita yang melanjutkan.

Di dalam ekonomi Islam ada juga ilmu tentang wasiat, warisan, juga wakaf yang jelas memperhatikan keberlangsungan harta yang secara spesifik ditata kelola dalam rangka kelestarian untuk generasi selanjutnya.

Setiap sistem ekonomi punya ciri khusus dalam beberapa praktiknya sehingga suatu sistem ekonomi itu bisa disebut sistem ekonomi A, Sistem ekonomi B. Begitu pula halnya dengan sistem ekonomi Islam. Islam punya fondasi tersendiri dalam segi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk membedakan mana yang ekonomi Islam mana yang bukan.

Dalam ekonomi, Islam menganut keadilan dan kejujuran. Menurut Islam, manusia adalah *khalifah* atau wakil Allah di muka bumi yang menjadi bagian dari seluruh rencana Allah dan telah diberikan hak terbatas terhadap alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Penghapusan bunga, pelembagaan sedekah dan zakat, konsep halal dan haram, distribusi kekayaan yang merata, melarang penimbunan harta serta konsen pada kesejahteraan rakyat miskin merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam.

Berikut coba kita kupas beberapa ciri khas dalam sistem Ekonomi Islam, diantaranya;

a. *Meyakini Allah Maha Pemberi dan Manusia Hanya Pemegang Amanah*

Ini adalah ciri khusus paling utama dalam sistem Ekonomi Islam. Allah lah yang memberi penghidupan bagi semua makhluknya yang ada di muka bumi, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, bahkan sampai binatang melata pun akan diberi rezeki oleh Allah. Dalam sebuah ayat disebutkan “Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah pemberi rezekinya”.

Sangat banyak ayat Alquran dan hadist yang menunjukkan betapa Allah berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan makhluknya. Pernyataan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Ia kehendaki adalah wujud keseimbangan hidup, tidak bisa dibayangkan jika di dunia ini semua makhluk diberikan rezeki yang sama maka akan terjadi kebosanan dan ketidak seimbangan hidup. Setiap penganut sistem Ekonomi Islam harus benar-benar meyakini bahwa hanya Allah-lah

yang Maha Pemberi rezeki, terlepas dari banyak atau sedikit rezeki tersebut, sama-sama pemberian dari Allah yang patut dan harus disyukuri.

Segala sesuatu yang Allah karuniakan di bumi dan langit berpulang kembali kepada Allah, Dia lah pemilik sejatinya. Meskipun segalanya sudah diberikan kepada manusia, tetap harus disadari bahwa hak yang diberikan itu sangat terbatas, hanya untuk menopang kehidupannya di muka bumi. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dengan baik apa pun yang Allah berikan. Jadi, posisi manusia dalam ekonomi hanyalah sebagai pemegang amanah atau penerima kuasa. Sehingga ketika amanah itu diambil, manusia tetap berjalan sebagai mestinya tanpa banyak mengeluh.

Semua kelimpahan yang diberikan Allah kepada manusia tidak lain hanya lah untuk menguji manusi mengenai kekuatannya dalam beramal baik dan menafkakhannya sebagaimana dituntun oleh Alquran dan Hadist.

b. Konsep Halal dan Haram

Konsep halal dan haram diperkenalkan Islam dalam sistem Ekonomi Islam sebagai fondasi yang fundamental dalam membangun perekonomian umat. Konsep ini berperan sangat penting dalam hal produksi dan konsumsi. Semua produk, jasa, atau barang yang diproduksi dan dikonsumsi harus dirujuk kepada halal dan haram. Seperti contoh dalam memproduksi, Islam melarang praktik mencuri dan tidak diperkenankan mengonsumsi barang haram seperti minuman keras, dan sebagainya. Semua yang jelas halalnya itu baik bagi sistem ekonomi Islam dan semua yang haram sangat dilarang diperdagangkannya.

c. Sistem Sedekah

Sistem sedekah dalam Ekonomi Islam menjamin terwujudnya distribusi kekayaan yang merata di dalam masyarakat Muslim dan memastikan bahwa kekayaan tidak ditimbun sehingga menjadi sia-sia. Aturan ekonomi Islam dalam sedekah meliputi pembayaran *zakat*, *sadaqatul fitr*, uang tebusan, dan pembayaran tidak wajib seperti *infak*, membantu fakir miskin, donasi, *wakaf*, dan sebagainya.

Islam telah menyatakan bahwa kaum miskin dan fakir memiliki bagian di dalam harta kaum kaya, dan kaum kaya berkewajiban membayar hak kaum miskin tersebut tanpa mengurangi sedikit pun.

d. Penghapusan Bunga

Salah satu ciri sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah penerapan bunga. Dalam Islam, bunga yang diartikan sebagai tambahan dari suatu pinjaman adalah dosa besar. Mereka yang bergelut dalam bunga telah diperingatkan dengan perang melawan Allah serta Rasul-Nya. Alquran sudah sangat jelas mengharamkan bunga (*riba*) serta menjelaskan nasib orang yang masih berkecimpung di dalamnya. Jadi, dalam sistem ekonomi Islam tidak dikenal dengan bunga, tetapi berupa bagi hasil jika memang sesuatu yang dipinjam itu ingin dikembangkan dan peminjam serta pemberi pinjaman

harus sama-sama mencari solusi terbaik jika terjadi suatu hal yang tak diinginkan di awal.

e. Larangan Menimbun Harta

Dengan sangat jelas dan deskriptif, Islam telah melarang penimbunan harta dan siapa pun yang menimbun harta serta tidak membelanjakannya di jalan Allah akan disiksa dengan siksa sangat pedih. Penimbunan harta adalah kejahatan besar karena sama artinya dengan membuntukan aliran harta yang telah Allah anugerahkan dari si kaya kepada si miskin yang benar-benar memerlukannya.

f. Mengutuk Materialisme dan Jalan Tengah

Islam sangat mengutuk perilaku yang mengarah kepada materialisme atau menganggap harta adalah segalanya. Di satu sisi, ketika ada seorang pendeta yang menganjurkan berpantang dari hal-hal yang bersifat dunia, Islam pun menentang hal tersebut. Artinya, Islam sangat sesuai dengan fitrah hidup manusia, hidup tidak perlu berlebihan, manusia dibekali dengan nafsu maka pemenuhan akan hak nafsu pun harus pada jalannya dan tidak boleh dihentikan karena akan menjurus pada hal buruk lainnya.

Islam memilih untuk mengambil jalan tengah dalam kepemilikan harta, harta bukan segalanya, hartanya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sewajarnya. Jika bergelimpahan harta maka harus disadari bahwa sebagian harta itu adalah hak mereka yang masih kekurangan dan perlu dibantu.

g. Keadilan tidak Berarti Samarata

Islam menegakkan keadilan dan kejujuran dalam produksi maupun distribusi kekayaan dan dalam kepemilikan alat-alat untuk mencari mata penghasilan. Islam sangat menyadari bahwa tidak ada kesamaan dalam kepemilikan suatu barang atau dalam kata lain, harta si A tidak akan bisa selalu sama jumlahnya dengan harta si B. Maka dari itu, Islam menganjurkan agar Muslim tidak iri hati dengan saudaranya yang punya kelebihan harta, karena hakikatnya, dengan memberikan kelebihan harta bagi sebagian lain, Allah sedang menguji apakah yang diberi bersyukur dan yang dikurangi bersabar?

Allah menguji kaum miskin dengan kesempitan nafkah untuk melihat apakah mereka kehilangan kepercayaan kepada Allah dan menjadi cemburu kepada si kaya ataukah tetap beriman, bersyukur, dan bersabar dengan kondisi yang ada sehingga suatu saat ia menjadi pantas untuk Allah naikkan derajatnya.

4. Perbedaan Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Konvensional

Pada krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah dari sistem ekonomi konvensional. Karena ekonomi konvensional selalu mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Hal ini jauh berbeda dengan yang ditawarkan sistem ekonomi *sya'riah*, dengan instrumen profitnya yaitu dengan cara bagi hasil.

Sistem ekonomi *syariah* sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis, ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah dari ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individu, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Menurut pengetahuan umum (pengetahuan dasar) pada fakultas ekonomi, Teori Mikro Ekonomi didefinisikan sebagai teori ekonomi yang menelaah hubungan (perilaku) variabel ekonomi individual, atau perilaku ekonomi dalam ruang lingkup kecil seperti: permintaan suatu barang, produksi suatu barang, konsumsi suatu barang, harga suatu barang, dan sebagainya. Ada pun Teori Makro Ekonomi adalah teori ekonomi yang menelaah hubungan (perilaku) variabel-variabel ekonomi secara *agregat* (keseluruhan) seperti kesempatan kerja, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan nasional, permintaan uang, investasi nasional, jumlah uang beredar, tingkat bunga, utang pemerintah, neraca pembayaran, dan sebagainya.

Kemudian, bagaimana kah ekonomi Islam memandang tentang eksistensi Teori Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi dalam dunia akademisi, yang seolah tampak menjadi pondasi dasar bagi para pakar ekonomi dalam membahas segala bentuk persoalan ekonomi. Berikut pembahasannya.

Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional ditinjau dari moral dan etika

Menurut Qardhawi, sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasian yang beraneka ragam, tetapi menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik ada perbedaannya. Hal itu karena sistem Islam selalu menetapkan secara global dalam masalah-masalah yang mengalami perubahan karena perubahan lingkungan dan zaman. Sebaliknya, menguraikan secara rinci pada masalah-masalah yang tidak mengalami perubahan.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik maupun yang bersifat spiritual.

Dalam menjalankan kehidupan ekonomi, tentu Allah telah menetapkan aturan-aturan yang merupakan batas-batas perilaku manusia sehingga menguntungkan suatu individu tanpa merugikan individu yang lain. Perilaku ini lah yang harus diawasi dengan ditetapkannya aturan-aturan yang berlandaskan aturan Islam, untuk mengarahkan

individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan dan mengontrol serta mengawasi berjalannya aturan-aturan itu.

Hal yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya adalah terletak pada aturan moral dan etika ini. Aturan yang dibentuk dalam Ekonomi Islam merupakan aturan yang bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk, dan tujuan akhir manusia. Sedangkan pada sistem yang lain tidak terdapat aturan-aturan yang menetapkan batas-batas perilaku manusia sehingga dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.

Beberapa aturan dalam Ekonomi Islam sebagai berikut.

- a. Segala sesuatunya adalah milik Allah, manusia diberi hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai *khalifah* atau pengemban amanat Allah, untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah.
- b. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.
- c. Semua manusia tergantung pada Allah sehingga setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.
- d. Status *kekhalifahan* berlaku umum untuk setiap manusia, namun tidak berarti selalu punya hak yang sama dalam mendapatkan keuntungan. Kesamaan hanya dalam kesempatan, dan setiap individu dapat menikmati keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya.
- e. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Hak dan kewajiban ekonomi individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.
- f. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban.
- g. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Allah menyukai orang yang bila dia mengerjakan sesuatu melakukannya dengan cara yang sangat baik.
- h. Jangan membikin *mudarat* dan jangan ada *mudarat*.
- i. Suatu kebaikan dalam peringkat kecil secara jelas dirumuskan. Setiap Muslim dihibau oleh sistem etika (akhlak) Islam untuk bergerak melampaui peringkat minim dalam beramal saleh.

Mekanisme pasar dalam masyarakat Muslim tidak boleh dianggap sebagai struktur atomistik, tetapi akumulasi dan konsentrasi produksi mungkin saja terjadi, selama tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerja sama.

Dari segi teori nilai, dalam ekonomi Islam tidak ada sama sekali pemisahan antara manfaat normatif suatu mata dagangan dan nilai ekonomisnya. Semua yang dilarang digunakan, otomatis tidak memiliki nilai ekonomis.

a. *Ekonomi Islam*

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi *syariah*, dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil.

Sebenarnya, Ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya Ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, Ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihanannya, pada setiap sistem yang dimilikinya.

b. *Ekonomi Konvensional*

Sistem ekonomi konvensional atau juga dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis diawali dengan terbitnya buku *The Wealth of Nation* karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga pengambil kebijakan negara.

Lahirnya sistem Ekonomi Kapitalis, sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran dan perekonomian benua Eropa pada masa sebelumnya. Pada suatu masa, di Benua Eropa pernah ada suatu zaman tidak ada pengakuan terhadap hak milik manusia, melainkan yang ada hanya lah milik Tuhan yang harus dipersembahkan kepada pemimpin agama sebagai wakil mutlak dari Tuhan. Pada zaman tersebut yang kemudian terkenal dengan sistem universalisme. Sistem ini ditegakkan atas dasar keyakinan kaum agama “semua datang dari Tuhan, milik Tuhan, dan harus dipulangkan kepada Tuhan”.

Tabel 1.1
Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

No	Keterangan	Islam	Konvensional
1	Sumber	Alquran	Daya pikir manusia
2	Motif	Ibadah	<i>Rasional materialism</i>
3	Paradigma	<i>Syariah</i>	Pasar
4	Pondasi dasar	Muslim	Manusia ekonomi
5	Landasan fillosofi	<i>Falah</i>	<i>Utilitarian individualism</i>
6	Harta	Pokok kehidupan	Aset
7	Investasi	Bagi hasil	Bunga

No	Keterangan	Islam	Konvensional
8	Distribusi kekayaan	Zakat, infak, shodaqoh, hibah, hadiah, wakaf, dan warisan.	Pajak dan tunjangan
9	Konsumsi-produksi	Masalah, kebutuhan, dan kewajiban.	Egoism, materialism, dan rasionalisme.
10	Mekanisme pasar	Bebas dan dalam pengawasan.	Bebas

B. ANALISIS SEJARAH EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO

Pengakuan dunia terhadap ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri baru tercipta pada abad 18 M, setelah Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nation* pada tahun 1776. Masa ini merupakan masa awal bagi perkembangan ilmu ekonomi dunia, sebab pasca munculnya Adam Smith yang disertai dengan terbitnya buku itu, yaitu buku yang menjadi rujukan bagi ekonom seluruh dunia, bahkan hingga saat ini, mampu merangsang para pemikir ekonomi Barat lainnya menerbitkan buku-buku lain yang kemudian pemikiran di dalamnya juga menjadi rujukan bagi ekonom seluruh dunia. Kemudian, para penulis-penulis buku tersebut menjadi tokoh yang dikagumi semua bangsa di dunia.

Mereka itu adalah tokoh-tokoh aliran klasik yang memiliki pemikiran yang saling mendukung dengan pemikiran Adam Smith. Seperti David Ricardo (1815), Thomas Robert Malthus (1798), Jean Baptise Say (1832), dan John Stuart Mill (1848). Teori ekonomi dari pemikiran mereka ini sering disebut dan dianggap sebagai pondasi dasar dari Teori Ekonomi Mikro.

Pemikiran *David Ricardo* yang populer adalah *teori harga relatif* berdasar biaya-biaya produksi, yang kemudian melahirkan teori biaya sewa tanah, teori biaya *capital* (bunga), dan teori upah tenaga kerja (nilai kerja dan upah alami). Ada pun *Thomas Robert Malthus* pemikirannya yang populer adalah *teori populasi*, yang dari pemikirannya tersebut memicu pemerintahan untuk menggalakkan dua hal, yaitu program Keluarga Berencana (KB), dan atau meningkatkan produksi nasional (PDB). Demikian pula pemikiran ekonomi dari JB. Say yang mendukung pemikiran Malthus untuk meningkatkan produksi nasional, sebab penawaran itu akan menghasilkan permintaannya sendiri, artinya setiap produksi yang dihasilkan akan mampu dibeli/diserap oleh konsumen/masyarakat. Dengan begitu, produksi harus terus ditingkatkan demi mengatasi problem ekonomi dalam pandangan mereka, yaitu *Scarcity* (kelangkaan).

Demikianlah teori-teori dari tokoh ekonomi dunia yang pemikirannya sejak dahulu hingga saat ini menjadi rujukan bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Pemikiran para tokoh tersebut menjadi kurikulum wajib bagi sekolah menengah dan apalagi perguruan tinggi di negeri ini. Bukan hanya sekedar teori dalam mengikuti pemikiran

mereka ini, namun teori-teori tersebut juga dipraktikkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat, baik oleh bangsanya sendiri, maupun oleh seluruh bangsa di dunia ini.

Namun, pemikiran ekonomi mereka adalah buah hasil dari pemikiran manusia yang merupakan makhluk lemah, hingga dapat dipastikan apabila pemikiran yang dihasilkan oleh makhluk yang lemah sudah barang tentu akan berbuah kelemahan pula. Hingga hal ini dibuktikan pada tahun 1929, praktik dari pemikiran mereka berbuah bencana. Terjadi lah pada saat itu peristiwa monumental dalam sejarah perekonomian dunia, *The Great Depression* di Amerika, dan bahkan tidak cukup sampai di wilayah tersebut saja, dampaknya merambah ke seluruh negara-negara Eropa, bahkan belahan dunia lainnya seperti Asia.

Depresi Besar (Great Depression) adalah peristiwa yang menghancurkan segala sendi perekonomian negara-negara dunia hingga ke level yang lebih kecil, yaitu individu masyarakat. Pada masa ini meledaklah angka kemiskinan karena pengangguran yang merajalela terutama di Amerika dan Eropa, inflasi melambung tinggi menambah daya beli masyarakat mencapai titik nol. Namun dari peristiwa tersebut, sayangnya disikapi oleh para pemikir dan pengambil kebijakan ekonomi mereka dengan terus dan tetap merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh mereka yang selama ini membuat perekonomian mereka maju, yaitu pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan kawan-kawannya. Akibatnya tak ayal lagi, diprediksi dan dipastikan, dan terbukti masa depresi ini tak kunjung usai bertahun-tahun lamanya, dan korban jiwa pun terus berjatuhan.

Pemikiran *mainstream*/utama dari para tokoh seperti Adam Smith dan kawan-kawannya tersebut adalah menolak segala bentuk campur tangan pemerintah. Jadi, apabila terjadi suatu masalah ekonomi di tengah-tengah masyarakat, menurut mereka harus dibiarkan saja, pemerintah tidak dikehendaki dalam memberikan solusi. Sebab masalah tersebut akan terselesaikan sendiri secara alami, yaitu diselesaikan oleh *invisible hand*. Dan *invisible hand* yang terbentuk adalah hasil dari mekanisme pasar, yang merupakan titik hasil dari pertemuan sisi penawaran dan sisi permintaan. Contoh mekanisme pasar adalah: apabila pada suatu masa harga beras mahal akibat sedikitnya jumlah produksi maka manusia akan jarang untuk bisa menikmati beras. Ini adalah sisi permintaan karena harga tinggi maka permintaan akan rendah. Namun di sisi lain, di sisi penawaran karena tingginya harga beras maka akan mengundang produsen lain untuk berkecimpung dalam produksi beras, sebab memproduksi beras akan sangat besar keuntungannya karena harganya yang tinggi. Maka akan melahirkan produsen-produsen baru yang memproduksi beras, alhasil produksi beras pun meningkat. Sesuai hukum penawaran, semakin tingginya penawaran beras di pasar oleh para produsen, tentu akan menurunkan harga beras tersebut, sebab masing-masing produsen akan bersaing agar berasnya laku dengan cara menurunkan harga. Akibatnya, harga beras turun, dan berbisnis beras pun tidak lagi menjadi ajang bisnis yang menggiurkan maka satu demi satu produsen beras pun beralih profesi meninggalkan bisnis berasnya. Sekali lagi produksi beras menjadi sedikit sehingga kembali melambungkan harga beras.

Demikian seterusnya, alhasil sisi permintaan dan penawaran pun bertemu di titik *equilibrium*.

Demikian lah pemikiran Adam Smith dalam perekonomian, tampak sebagai solusi jitu dari setiap problem ekonomi yang muncul. Teori seperti ini lah yang menjadi pegangan bagi para pengambil kebijakan pada masa itu. Sebab diyakini bahwa kondisi sulit pada masa tersebut (depresi besar) akan terselesaikan dengan sendirinya sebagaimana terselesaikannya masalah harga beras seperti contoh di atas. Ternyata hasilnya berkata lain, penderitaan akibat masa resesi tersebut tak kunjung usai, bahkan telah banyak mengambil korban jiwa.

Di tengah-tengah masa resesi ini muncul lah pemikir ekonomi John Maynard Keynes bersama bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (Teori Umum Pengangguran, Bunga, dan Uang) pada tahun 1936. Pemikirannya mengkritik teori tokoh ekonomi seperti Adam Smith dkk, yaitu dengan mengharuskan adanya campur tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Bukannya Keynes tidak mempercayai pemikiran Adam Smith mengenai *invisible hand* dari mekanisme pasar, namun apabila pemerintah tidak turut campur dalam persoalan ini, menurut Keynes dalam waktu lama masyarakat akan mati kelaparan dalam penantian hadirnya *invisible hand* tersebut. Oleh karena itu, pemerintah secepat mungkin turut andil dalam persoalan ini.

Pikiran utama dari Keynes adalah bagaimana pemerintah mengatasi masalah inflasi dan pengangguran pada masa resesi ini. Mengatasi inflasi, yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga bank, yang biasa kita kenal dengan kebijakan moneter. Mengatasi masalah pengangguran dengan seberapa besar pemerintah menggalakkan program padat karya, dengan mengambil dana yang berasal dari pajak maka kebijakan seperti ini biasa kita kenal dengan kebijakan fiskal. Dengan demikian, dua tema pokok ini lah yang menyebabkan munculnya pembahasan Ekonomi Makro. Sebab masalah inflasi dan pengangguran adalah masalah kolektif (agregat) yang belum pernah terpikirkan oleh Adam Smith bersama teman-temannya yang tergabung dalam aliran Klasik. Setiap pemikiran dari para tokoh aliran Klasik ini lah yang saat ini dikenal dengan pembahasan Ekonomi Mikro. JM Keynes dikenal sebagai Bapak Ekonomi Makro karena melahirkan pemikiran agregatif, sedangkan setiap pemikiran tokoh aliran Klasik dikenal sebagai teori-teori Ekonomi Mikro.

Jadi, lahirnya Ekonomi Makro pada tahun 1936 adalah sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh teori dan praktik Ekonomi Mikro yang lahir sejak tahun 1776, permasalahan tersebut adalah inflasi dan pengangguran. Dua tema utama yang menjadi pembahasan dalam ekonomi makro. Ada pun materi lain selain inflasi dan kesempatan kerja dalam ekonomi makro, merupakan hanya materi pendukung atau alat untuk melihat apakah solusi yang diberikan ekonomi makro menggapai sukses seperti pembahasan PDB dan pendapatan nasional.

1. Definisi Ekonomi Mikro dan Makro menurut Ekonomi Islam

Dari uraian sejarah singkat dari ekonomi mikro dan ekonomi makro tersebut maka definisi ekonomi mikro dan ekonomi makro tidaklah lagi sebagaimana definisi umum yang biasa kita kenal dalam buku-buku mengenai keduanya. Ekonomi mikro disebutkan sebagai teori yang menelaah kegiatan ekonomi secara individual dari sudut pandang hubungan antara produksi, konsumsi, harga, permintaan, dan penawaran. Sedangkan ekonomi makro adalah teori yang menelaah hubungan variabel ekonomi secara agregat seperti inflasi, pengangguran, PDB dan pendapatan nasional, dan lain-lain. Tidaklah demikian. Sebagaimana sejarah menyebutkan maka definisi dari ekonomi mikro dan makro dapat kita definisikan dengan definisi yang lebih akurat, sebagai berikut:

Bahwa Ekonomi Mikro adalah:

“Teori ekonomi yang menelaah kegiatan ekonomi antar individu dalam suatu masyarakat, yang apabila teori tersebut dipraktikkan dalam kehidupan nyata pasti akan menimbulkan masalah, yang masalah tersebut tidak akan pernah dapat terselesaikan dengan cara apa pun juga.”

Apabila ada sebuah solusi yang mampu meredam gejala masalah tersebut, pasti dikemudian hari masalah tersebut akan muncul kembali dengan permasalahan yang jauh lebih besar.

Ada pun definisi dari Ekonomi Makro adalah:

“Teori ekonomi yang membahas masalah kebijakan yang diambil pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh praktik dari teori ekonomi mikro”.

Sebenarnya, dalam definisi baru dari ekonomi makro tersebut juga kurang tepat sebab solusi yang diberikan menurut pembahasan dalam ekonomi makro tidak pernah menyentuh sumber penyakitnya atau sumber permasalahannya. Sehingga bila diibaratkan seperti seorang dokter yang memberi resep obat penyakit asma, padahal penyakit yang diderita pasiennya adalah penyakit kanker. Jelas tidak mungkin sembuh.

2. Mengidentifikasi Sumber Masalah

Masalahnya tentu ada pada setiap pemikiran yang merupakan hasil dari pemikiran manusia yang merupakan makhluk lemah, yang sudah tentu akan menghasilkan pemikiran lemah yang sarat dengan cacat. Letak kelemahannya ada pada pemikiran yang menghasilkan peraturan hukum (sistem) yang mengatur kegiatan ekonomi antara manusia satu dengan manusia lainnya, bukan pada masalah teknisnya yang berfungsi sebagai alat penjalanan roda perekonomian seperti bagaimana tata cara teknis memproduksi barang dan jasa.

Permasalahan pokok dalam teori ekonomi mikro adalah menyangkut sistem dalam menghasilkan *output*/hasil produksi, yaitu berkaitan dengan biaya-biaya dari faktor-faktor produksi seperti SDA (biaya sewa tanah dan hukum industri), Modal (biaya bunga modal dan teori akumulasi kapital), dan SDM (biaya tenaga kerja). Masing-masing dari biaya faktor-faktor produksi tersebut menurut tokoh aliran Klasik memiliki peraturannya sendiri saat diterapkan. Menurut Ekonomi Islam, ini lah sumber masalah yang seharusnya menjadi fokus pembahasan para ahli untuk menguraikan problem ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Bukannya berputar pada masalah pembahasan bagaimana meningkatkan pendapatan nasional dan menaikkan suku bunga, sebagaimana solusi yang selama ini diberikan ekonomi makro.

Sebagaimana dalam penghitungan, apabila menggunakan pendekatan pendapatan, biaya-biaya inilah (SDA, SDM, Modal) yang jika ditambahkan dengan profit/keuntungan, pada seluruh perusahaan nasional, menjadi perhitungan setiap bangsa di dunia untuk melihat jumlah Pendapatan Nasional mereka. Apakah mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya atau kah tidak. Apabila ada kemajuan dari tahun sebelumnya maka keadaan ekonomi suatu bangsa atau PDB/PNB mereka dikatakan mengalami kemajuan.

a. *Biaya Sewa Tanah dan Hukum Industri*

Menurut David Ricardo, tanah adalah faktor produksi yang dimiliki rumah tangga dan yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan proses produksinya. Tanah tersebut tetap menjadi milik perseorangan (rumah tangga) selama sebuah perusahaan belum membeli darinya. Dengan demikian, harus ada kompensasi bagi pemilik tanah saat tanah tersebut digunakan oleh pemilik industri/perusahaan, sebab pemilik tanah tersebut memang akan memintanya, dan kompensasi tersebut adalah sewa. Hukum pertanahan di Indonesia pun demikian, seorang pemilik tanah dijamin atas hak kepemilikan tanahnya dengan sebuah sertifikat. Yang menjamin bahwa tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya selamanya, kecuali melalui proses jual beli maupun hibah. Dengan demikian, walaupun tanah tersebut dibiarkan tanpa dikelola bertahun-tahun, tanah tersebut akan tetap menjadi pemilik awal.

Ada pun hukum kepemilikan tanah dalam ekonomi Islam tidak sebagaimana teori hukum pertanahan dalam teori ekonomi mikro David Ricardo. Ekonomi Islam mengharamkan seorang pemilik tanah menyewakan tanahnya. Ekonomi Islam hanya memberikan dua pilihan kepada pemilik tanah, yaitu segera dikelola oleh dirinya sendiri, atau ia berikan tanah tersebut kepada orang lain. Apabila tanah tersebut tidak dikelola oleh pemiliknya maka negara memberikan jangka waktu tiga tahun berturut-turut. Apabila lebih dari tiga tahun berturut-turut tanah tersebut tidak ia kelola maka dengan paksa negara akan mengambil hak kepemilikannya untuk kemudian diberikan pada orang lain.

Sebagaimana Hadits dari Umar bin Khattab:

“Barang siapa menelantarkan tanah selama tiga tahun berturut-turut dan ia tidak mengelolanya, maka apabila datang orang lain dan ia mengelolanya, maka tanah tersebut menjadi miliknya”.

“Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila ia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil”. (HR. Bukhari)

Dan larangan Rasulullah SAW menyewakan tanah:

“Siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya menanami tanahnya, atau hendaknya ditanami (diberikan pada) saudaranya. Dan janganlah menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, maupun dengan makanan yang sepadan.” (HR. Abu Daud)

Hikmah dari hadits-hadits Nabi di atas jika diterapkan adalah manusia akan terdorong untuk membuat semua tanah yang ada di muka bumi ini produktif (menghasilkan bahan pangan dan sebagainya). Sebab ia terancam akan kehilangan hak kepemilikan atas tanahnya jika tanahnya ditelantarkan selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Dengan demikian, produksi bahan pangan pun akan melimpah, dengan begitu akan membuat harganya murah dan dapat terjangkau oleh semua kalangan. Tidak sebagaimana teori sewa tanah David Ricardo, yang mengancam tanah akan mati terbengkalai dan tidak produktif, sebab tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya akan tetap menjadi miliknya, dan tidak dapat diganggu gugat, walaupun tanah tersebut diterlantarkan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Artinya, tanah tersebut menjadi tidak produktif selama berpuluh-puluh tahun. Alhasil produksi bahan pangan pun terbatas, sebab tanah yang menghasilkan produksi bahan pangan juga terbatas. Akibatnya, harga bahan pangan tidak akan semurah apabila produksi bahan pangan tersebut melimpah ruah. Sebab kebanyakan tanah-tanah tersebut terbengkalai tidak menghasilkan apa pun, dan hanya sedikit dari tanah-tanah tersebut yang produktif. Jadi, solusi dari ekonomi Islam tentang pertanahan hanya dua, yaitu hendaknya tanah tersebut digarap, atau diberikan pada orang lain yang mampu menggarapnya, tidak ada pilihan lain. Juga tanah tersebut tidak boleh disewakan sebab kebolehan sewa terhadap tanah, selain melanggar larangan dalam hadits Nabi, juga akan dapat menghilangkan tujuan hukum ekonomi Islam yang dimaksudkan agar semua tanah produktif dan menghasilkan bahan pangan yang melimpah ruah.

Ada pun hukum industri menurut ekonomi Islam, semuanya harus mengikuti hukum dari hasil produksi yang dihasilkan (*ash-shina'atu tu'khozu hukmu ma tuntijuhu*). Ada pun menurut Adam Smith, semuanya harus diprivatisasi melalui

mekanisme pasar sebab ekonomi mikro berpedoman pada asas penghilangan campur tangan pemerintah dalam perekonomian (*laissez faire laissez passer*). Sedangkan menurut ekonomi Islam, apabila hasil produksi bersifat kepemilikan umum maka status industrinya pun berubah menjadi kepemilikan umum, yang tidak boleh dimiliki perorangan/diprivatisasi, dan atau diserahkan pengelolaannya kepada swasta/asing, atau bahkan juga tidak boleh dimiliki oleh negara sekali pun. Semua hasil produksi yang berstatus kepemilikan umum, atau yang bersifat sebagai pemenuh hajat hidup orang banyak, segala manfaat benda dan keuntungannya adalah milik rakyat, bukan milik negara, atau juga perseorangan. Sehingga kekayaan menjadi terdistribusi merata pada seluruh rakyat. Bukan hanya pada individu yang menguasai kekayaan alam tersebut. Ada pun jenis-jenis barang berkepemilikan umum secara lengkap dapat Anda lihat pada bagian lain di *blog* ini tentang jenis-jenis kepemilikan umum.

b. Biaya Bunga Modal dan Teori Akumulasi Kapital

Menurut teori aliran Klasik, bunga merupakan instrumen utama yang membuat lembaga keuangan perbankan dapat tegak berdiri. Bila tiada bunga, tidak akan ada perbankan. Keberadaan perbankan dimaksudkan untuk mempermudah pihak yang membutuhkan modal bertemu dengan pihak pemilik modal, selain itu bunga juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Dengan demikian, bunga merupakan instrumen penting dalam teori ekonomi mikro juga makro. Bunga lah yang membuat roda perekonomian terus berjalan.

Namun, tidak demikian menurut Ekonomi Islam, bunga merupakan instrumen, haram yang harus disingkirkan sejauh mungkin. Sebab bunga obligasi dan bunga perbankan lah yang membuat APBN pemerintah harus mendanai LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam menyetatkan kembali perbankan yang sakit. Alhasil pemerintah harus mencetak uang setiap tahunnya demi menutupi APBN yang jebol. Tentu saja akibatnya jumlah uang beredar akan bertambah setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah uang beredar tentu membuat nilai uang menjadi turun. Dengan begitu, tampak lah seolah harga-harga seluruh barang akan naik secara serentak, padahal kejadian sebenarnya adalah menurunnya nilai uang karena jumlahnya yang selalu bertambah, dan ini lah yang dimaksud dengan inflasi yang sebenarnya, yaitu turunnya nilai uang, dan bukan naiknya harga seluruh barang. Alhasil, secara riil rakyat yang berpenghasilan tetap akan termiskinkan secara sistematis.

Solusi dari ekonomi Islam agar uang yang beredar di masyarakat bisa tetap jumlahnya sehingga masyarakat tetap termudahkan mendapatkan uang tersebut sebagai alat tukar adalah dengan memberi hukuman *ta'zir* yang menjerakan bagi para penimbun uang, penyimpan uang yang tidak memiliki tujuan konsumsi di masa depan. Sehingga mereka dipaksa oleh pemerintah untuk membelanjakan uang yang disimpan olehnya.

Ada pun teori akumulasi kapital adalah teori yang berasal dari Adam Smith. Menurut Smith betapa pentingnya modal dalam proses produksi, sebab modal yang besar akan membuat jumlah produksi barang juga besar, sebab modal besar akan dapat

membeli mesin-mesin canggih untuk mempermudah produksi secara massal. Apabila *output* dapat diproduksi secara massal maka biaya produksinya pun akan sedikit, dengan demikian harga per unitnya akan dapat dijual dengan harga semurah mungkin. Dengan begitu, Smith dan para pemikir ekonomi Kapitalisme lainnya bersepakat membuat suatu rumusan bentuk perusahaan yang mampu mengumpulkan modal besar dengan mudah dan dalam waktu singkat, yang efektif dan efisien. Bentuk perusahaan tersebut adalah PT (Perseroan Terbatas), dan penunjang modal yang dapat diandalkan PT adalah eksistensi perbankan dan pasar modal.

Menurut Ekonomi Islam, bentuk perusahaan adalah kesepakatan kerja sama bisnis antara dua orang atau lebih yang ketentuannya harus mengikuti ketetapan hukum Allah. Seperti bentuk perusahaan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam adalah perseroan *Mudharabah, Inan, Abdan, Wujuh* dan *Mufawadhah*. Sedangkan PT dalam kajian Ekonomi Islam tidak memenuhi ketentuan hukum Ekonomi Islam sehingga tidak dibenarkan kaum muslim dalam berekonomi menggunakan sistem tersebut.

Ada pun hikmah dari pelarangan PT adalah, bila PT tersebut diterapkan akan membuat persaingan usaha menjadi tidakimbang. Pada perusahaan dengan modal besar akan dengan mudah mematikan usaha perusahaan dengan modal kecil, alhasil pemilik usaha kecil akan kehilangan usahanya, dan ia pun harus mencari pekerjaan. Bertambah lah jumlah pencari kerja, dan berkurang lah tempat bekerja. Sesuai hukum permintaan dan penawaran, harga tenaga kerja akan turun oleh sebab penawaran tenaga kerja yang meningkat.

c. *Biaya Tenaga Kerja*

Menurut David Ricardo, biaya/gaji tenaga kerja harus ditetapkan berdasarkan upah alami (*natural wage*). Upah alami adalah upah yang besarnya sekedar dapat membuat tenaga kerja tersebut dapat bertahan hidup. Sebab menurut Thomas Robert Malthus, apabila upah buruh/tenaga kerja tinggi maka mereka akan cenderung untuk terus bereproduksi. Alhasil jumlah penduduk akan terus melonjak melebihi jumlah produksi barang/jasa. Upah alami ini lah yang mengilhami lahirnya konsep UMR (Upah Minimum Regional) yang ditetapkan berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Upah alami ini juga yang biasa disebut oleh pelopor musuh bebuyutan ekonomi Kapitalisme, yaitu Ekonomi Sosialisme Karl Marx sebagai upah besi, sebagai bentuk kritikan kepada Ekonomi Kapitalisme.

Sebenarnya, kelahiran konsep UMR ini dimaksudkan untuk menjaga agar upah yang diterima seorang tenaga kerja tidak sampai turun hingga pada jumlah yang tidak mampu menopang kebutuhan hidupnya. Artinya, konsep ini dimaksudkan baik. Pemerintah memaksa para pemberi kerja untuk memberi gaji tenaga kerjanya di atas atau sama dengan UMR, agar para pekerja bisa dapat mempertahankan hidupnya sehingga hidupnya terjamin. Namun, yang sangat disayangkan adalah kebanyakan pemegang kebijakan ekonomi di dunia ini tidak pernah memahami problem dasar

penyebab yang melatarbelakangi bertambahnya penawaran tenaga kerja (jumlah pencari kerja) sehingga membuat harga tenaga kerja di pasaran tersebut menjadi turun. Ekonom dunia pun tidak pernah memahami latar belakang yang menyebabkan turunnya permintaan tenaga kerja (jumlah perusahaan). Yang seharusnya, apabila naiknya penawaran tenaga kerja diikuti oleh naiknya permintaan tenaga kerja, tentu naiknya penawaran tenaga kerja tersebut akan mampu terserap oleh permintaan tenaga kerja yang meningkat pula. Sehingga harga dari jasa tenaga kerja memiliki nilai pilih. Oleh sebab tidak difahaminya problem dasar tersebut, mengakibatkan setiap solusi yang diberikan pemerintah (ekonomi makro) tidak pernah dapat menyelesaikan masalah pengangguran.

Menurut ekonomi Islam, harga tenaga kerja harus sesuai dengan kesepakatan pekerja dan pemberi kerja. Dengan kata lain, tingkat upah tenaga kerja harus sesuai kesepakatan (*aqad*). Pemerintah tidak berhak dan tidak boleh menetapkan harga tenaga kerja. Pemerintah tidak boleh menetapkan UMR, UMP, atau yang lainnya. Maka bisa jadi, dalam Ekonomi Islam, gaji seorang tenaga kerja berada di bawah UMR.

Menurut Ekonomi Islam, salah satu penyebab naiknya penawaran tenaga kerja yang diikuti dengan turunnya permintaan tenaga kerja tersebut adalah akibat penerapan bentuk PT (Perseroan Terbatas). Sebab PT adalah bentuk perusahaan yang memudahkan berkumpulnya modal dalam jumlah besar dan cepat sehingga dengan mudah mematikan perusahaan-perusahaan kecil untuk gulung tikar. Akibatnya, pekerja di perusahaan-perusahaan kecil tersebut menjadi berstatus sebagai pencari kerja baru. Pengangguran pun bertambah.

Apabila PT ditiadakan dan diganti dengan bentuk sistem perseroan dalam Islam, maka tingginya penawaran tenaga kerja akan mampu diserap oleh tingginya permintaan tenaga kerja, sehingga harga tenaga kerja memiliki nilai pilih dari banyaknya permintaan tenaga kerja (perusahaan) maka harga tenaga kerja pun akan stabil.

C. PERBEDAAN EKONOMI MIKRO DAN MAKRO

Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua cabang, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang dimaksud dengan ekonomi makro adalah kajian tentang aktivitas ekonomi suatu negara, sedangkan ekonomi mikro adalah kajian tentang tingkah laku individual dalam ekonomi. Perbedaan yang esensial dalam kajian ekonomi mikro dan ekonomi makro mencakup dua hal sebagai berikut.

1. Adanya uang dalam ekonomi makro sehingga *nominal price* menjadi faktor kajian penting. Dalam kajian ekonomi mikro, yang terpenting adalah harga relatif (*relative price*, P_x/P_y), atau harga relatif pendapatan (*income relative price*, I/P_x , I/P_y). Adanya uang ini lah yang nantinya akan menghasilkan cabang ilmu ekonomi moneter.

2. Adanya pembeli dan penjual raksasa dalam ekonomi makro, yaitu pemerintah. Kemampuan dan perilaku pemerintah membelanjakan dan menabung uangnya dalam jumlah yang sangat besar menjadi kajian tersendiri yang nantinya akan menghasilkan cabang ilmu fiskal.

Bab ini menerangkan perbedaan yang esensial antar ekonomi mikro dan ekonomi makro tersebut.

1. Ekonomi Makro

Ilmu Ekonomi Makro adalah ilmu yang mempelajari variabel ekonomi secara keseluruhan. Variabel Ekonomi Makro antara lain: pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja atau pengangguran, laju inflasi, jumlah uang yang beredar, atau pun neraca pembayaran internasional. Ilmu Ekonomi Makro adalah ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut.

- a. Sejauh mana berbagai sumber daya yang telah dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya yang telah dimanfaatkan disebut *full employment*. Sebaliknya, sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian tersebut masih dalam keadaan *under employment* atau masih terdapat pengangguran.
- b. Sejauh mana perekonomian tersebut dalam keadaan stabil, khususnya stabilitas pada bidang moneter. Apabila nilai uang tersebut cenderung menurun dan dalam kurun jangka waktu yang panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya, terjadi juga deflasi.
- c. Sejauh mana perekonomian tersebut mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan disertai dengan distribusi pendapatan membaik yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan, terdapat yang disebut *trade off*, maksudnya bila ada yang satu membaik, yang lainnya akan cenderung memburuk.

Ilmu yg mempelajari tingkah laku kelompok pelaku ekonomi secara keseluruhan serta mempelajari gejala-gejala yang timbul dalam perekonomian suatu negara.

Contoh: perekonomian nasional, pengeluaran agregat, pengangguran, dan inflasi.

Tujuan: Bagaimana meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat suatu negara.

2. Ekonomi Mikro

Ilmu Ekonomi Mikro adalah ilmu yang mempelajari variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan, rumah tangga, dan sebagainya. Dalam ekonomi mikro dipelajari tentang bagaimana individu tersebut dalam menggunakan sumber daya yang telah dimilikinya sehingga akan tercapai tingkat kepuasan secara optimum. Secara teori, tiap-tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimum bersama dengan individu yang lain, akan menciptakan terjadinya

keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi *ceteris paribus* secara optimum. Secara teori, tiap-tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimum bersama dengan individu yang lain, akan menciptakan terjadinya keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi *ceteris paribus*.

Ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi parsial (unit-unit kecil) dari kegiatan ekonomi individual, yang dikenal sebagai konsumen dan produsen individual.

Contoh: iInteraksi di pasar barang, tingkah laku penjual dan pembeli, interaksi di pasar faktor produksi.

Tujuan: mengetahui bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen dan memaksimalkan keuntungan produsen.

Untuk lebih jelasnya, amati Tabel 1.2 yang memperlihatkan perbedaan antara ekonomi mikro dan makro dari sisi harga, unit analisis, dan tujuan analisis beserta contoh-contohnya.

Tabel 1.2
Perbedaan antara Ekonomi Mikro dan Makro

Dilihat dari segi	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
Harga	Harga adalah nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja.	Harga adalah nilai dari suatu komoditas secara keseluruhan atau <i>agregat</i> .
Unit analisis	Pembahasan tentang kegiatan ekonomi yang melibatkan secara individual. Contohnya: permintaan dan penawaran, pasar, biaya, dan laba atau rugi dari suatu perusahaan.	Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara <i>agregat</i> atau keseluruhan. Contohnya: pendapatan nasional, inflasi, deflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi.
Tujuan analisis	Ekonomi mikro lebih memfokuskan terhadap tujuan analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya yang dimiliki agar dapat tercapai kombinasi yang tepat.	Ekonomi makro lebih memfokuskan terhadap tujuan analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi yang dilakukan terhadap perekonomian yang terjadi secara keseluruhan.

Perbedaan mendasar antara Ilmu Ekonomi Mikro dan Ilmu Ekonomi Makro

Ilmu Ekonomi Mikro menganalisis bagian-bagian yang dilakukan oleh unit-unit kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Berbagai aspek yang diulas dalam teori ekonomi mikro telah dipaparkan di bagian sebelumnya. Dalam hal ini, pada umumnya pendekatan mikro terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku ekonomi dengan mengacu pada *signal* harga pasar. Pemahaman konsep-konsep ekonomi mikro dan aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis memungkinkan para pelaku ekonomi untuk membuat keputusan yang optimal.

Sebaliknya, Ilmu Ekonomi Makro merupakan analisis atas keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Dalam ekonomi makro, analisis dijalankan terhadap keseluruhan produsen dan konsumen dalam perekonomian. Teori ekonomi makro menerangkan aspek-aspek seperti penentuan tingkat perekonomian negara yang berkaitan dengan sampai di mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tiga masalah utama yang menjadi perbedaan para ahli dalam pengertian Ekonomi Islam!
- 2) Jelaskan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro dalam Islam!
- 3) Jelaskan pemikiran *mainstream*/utama dari para tokoh seperti Adam Smith dan kawan-kawannya dalam menolak segala bentuk campur tangan pemerintah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian Ekonomi Islam menurut para ahli. (halaman. 1.2).
Perbedaan pandangan dari para tokoh Ekonomi Islam menyangkut pengertian Ekonomi Islam atau pengertian Ekonomi *Syariah*, pada dasarnya berakar pada tiga masalah utama, yakni: *pertama*, metologi yang dipakai dalam membangun ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. *Kedua*, perbedaan dalam penafsiran konsep ekonomi seperti penafsiran makna *khilafah* dan implikasi kepemilikan. *Ketiga*, perbedaan tafsiran bangunan sistem ekonomi.
- 2) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan perbedaan mikro dan makro dalam Islam. Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua cabang, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang dimaksud dengan ekonomi makro adalah (halaman. 1.22)
- 3) Lihat dan pelajari bagian pemikiran *mainstream*/utama dari para tokoh seperti Adam Smith dan kawan-kawannya tersebut adalah menolak segala bentuk campur tangan pemerintah. (halaman 1.21)
Pemikiran *mainstream*/utama dari para tokoh seperti Adam Smith dan kawan-kawannya tersebut adalah menolak segala bentuk campur tangan pemerintah. Jadi, apabila terjadi suatu masalah ekonomi di tengah-tengah masyarakat, menurut mereka harus dibiarkan saja, pemerintah tidak dikehendaki dalam memberikan solusi. Sebab masalah tersebut akan terselesaikan sendiri secara

alami, yaitu diselesaikan oleh *invisible hand*. *Invisible hand* yang terbentuk adalah hasil dari mekanisme pasar, yang merupakan titik hasil dari pertemuan sisi penawaran dan sisi permintaan.



Rangkuman

Istilah ekonomi (*economic*) semula berasal dari perkataan Yunani *oekonomeia*, yang merupakan bentukan 2 kata: *oikos* berarti rumah tangga.

Ilmu ekonomi menyangkut hal-hal berikut.

1. Ekonomi sangat erat kaitannya dengan perilaku individu dan masyarakat.
2. Adanya sumber daya langka, tetapi mempunyai alternatif penggunaan.
3. Kegunaan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi.
4. Konsumen bisa saja dalam bentuk masyarakat, kelompok, atau individu.

Alquran tidak banyak mengemukakan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Alquran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum-kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen, dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi.

Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pada 4 (empat) sifat seperti berikut.

1. Kesatuan (*unity*).
2. Keseimbangan (*equilibrium*).
3. Kebebasan (*free will*).
4. Tanggung jawab (*responsibility*).

Hukum Ekonomi merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel ekonomi atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat atau hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi yang saling berkaitan. Contoh: hukum permintaan dan penawaran. Hukum ekonomi tidak berlaku mutlak seperti halnya dalam ilmu pasti, sebab pada dasarnya hukum ekonomi bertitik tolak dari tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum ekonomi tidak berlaku mutlak disebabkan adanya perubahan pada faktor-faktor yang memengaruhinya (keadaan sudah tidak *ceteris paribus*). Hukum ekonomi berlaku bila keadaan yang lain tetap/tidak berubah/*ceteris paribus*. Misalnya: hukum permintaan tidak berlaku apabila: selera manusia berubah, tingkat kebudayaan manusia selalu berubah, pendapatan masyarakat mengalami perubahan, dan adanya perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

Paul A. Samuelson mengatakan bahwa hukum ekonomi hanya berlaku pada derajat rata-rata dan bukan merupakan hubungan pasti. Hubungan yang terjadi dalam hukum ekonomi adalah sebagai berikut.

1. *Hubungan kausal* (hubungan sebab akibat), yaitu suatu peristiwa yang muncul, menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Kejadian ini tidak dapat berlaku. Sebaliknya, contoh: kenaikan gaji pegawai, menyebabkan harga mengalami peningkatan.

2. *Hubungan fungsional* adalah hubungan yang saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Contoh: permintaan banyak, sedangkan penawaran sedikit maka harga naik, begitu juga sebaliknya.

Pengertian Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan. Definisi Ekonomi Makro juga menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak orang atau masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Ekonomi makro pun mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, stabilitas harga serta keseimbangan neraca.

Pengertian Ekonomi Mikro adalah cabang Teori Ilmu Ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor *input*, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Definisi Ekonomi Mikro mempelajari perilaku produsen dan konsumen serta variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan dan rumah tangga.

Baik Ekonomi Makro dan Mikro memiliki ruang lingkup ilmu ekonomi yang berbeda. Berikut akan dijelaskan ruang lingkup Ekonomi Makro dan ruang lingkup Ekonomi Mikro berdasarkan variabel Ekonomi Makro dan variabel Ekonomi Mikro selengkapnya.

Ruang Lingkup Ekonomi Makro

Yang termasuk dalam ruang lingkup Ekonomi Makro antara lain pendapatan dan pengeluaran, pengangguran, dan inflasi serta deflasi.

1. Pengeluaran negara adalah total nilai seluruh produksi yang dikeluarkan negara pada masa yang sudah ditentukan. Sedangkan pendapatan negara adalah semua yang dihasilkan dari produksi dan penjualan.
2. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan meski dalam usia produktif.
3. *Inflasi* adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Sedangkan *deflasi* adalah periode ketika harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah.

Ruang Lingkup Ekonomi Mikro

Yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi mikro antara lain permintaan dan penawaran, teori produksi, elastisitas, teori perilaku konsumen, pasar, dan mekanisme harga.

1. Permintaan adalah barang atau jasa yang dibeli atau diminta atau dipesan oleh konsumen pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan oleh produsen dalam waktu dan tempat tertentu.
2. Teori produksi merupakan dasar untuk menganalisis biaya produksi dan tingkat dari produksi.
3. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah suatu produk yang diminta. Sedangkan elastisitas penawaran adalah sebuah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah produk yang ditawarkan.

4. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya.
5. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.
6. Mekanisme harga adalah fenomena yang sering terjadi karena harga yang ada di pasaran itu fleksibel, jadi harga bisa berubah kapan pun jika memang situasi kondisinya memungkinkan.

Tiap Ekonomi Makro dan Mikro memiliki contoh permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Permasalahan Ekonomi Makro lebih berfokus pada masalah ekonomi secara luas seperti ekonomi pemerintahan dan ekonomi antar negara. Sementara, permasalahan Ekonomi Mikro hanya mencakup usaha individu atau perusahaan tertentu. Berikut merupakan contoh Ekonomi Makro dan contoh Ekonomi Mikro dilihat dari permasalahan ekonomi yang dijumpai sehari-hari.

Contoh Ekonomi Makro:

Pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran, Kesempatan kerja, Pendapatan nasional, Kebijakan ekonomi, Inflasi, Deflasi, Kerja sama antar negara di dunia, Organisasi ekonomi internasional, Pendapatan per kapita, Ekspor, Impor, Siklus ekonomi, Investasi pemerintahan, dan Neraca pembayaran.

Contoh Ekonomi Mikro:

Perilaku konsumen, Perilaku produsen, Biaya, Permintaan, Penawaran, Investasi individu, Penetapan harga dasar, Penetapan harga tertinggi, Distribusi barang dan jasa, Laba perusahaan, Rugi perusahaan, Monopoli pasar, Stok dan persediaan barang dan jasa, Gaji karyawan, dan Pembangunan infrastruktur.

Perbedaan Ekonomi Makro dan Mikro bisa dilihat dari beberapa aspek, mulai pengertian dan definisi Ekonomi Makro dan Mikro, ruang lingkup dan variabel Ekonomi Makro dan Mikro serta contoh dan kasus permasalahan Ekonomi Makro dan Mikro.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sumber utama Ekonomi Islam adalah
 - A. Alquran dan As-sunnah
 - B. jihad dan ibadah
 - C. iman dan taqwa
 - D. halal dan haram

- 2) Kata “Islam” setelah kata “ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai tanpa memengaruhi makna atau definisi dari ekonomi itu sendiri.
 - A. petunjuk
 - B. identitas
 - C. dasar hukum
 - D. nilai

- 3) Ilmu ekonomi menyangkut hal-hal berikut, *kecuali*
 - A. ekonomi sangat erat kaitannya dengan perilaku individu dan masyarakat.
 - B. adanya sumber daya langka, tetapi tidak mempunyai alternatif penggunaan.
 - C. kegunaan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi.
 - D. konsumen bisa saja dalam bentuk masyarakat, kelompok, atau individu.

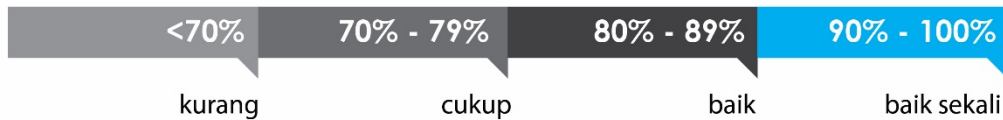
- 4) Pengertian Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan *syariah* (*al-‘Iqtisad al-Syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat. Pendapat tersebut disampaikan oleh
 - A. Yusuf Qardhawi
 - B. Ziauddin Ahmad
 - C. Umer Chapra
 - D. Louis Cartori

- 5) Perbedaan yang esensial dalam kajian Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro mencakup dua hal, yaitu
 - A. adanya uang dalam Ekonomi Makro sehingga *nominal price* menjadi faktor kajian penting dan adanya pembeli dan penjual raksasa dalam Ekonomi Makro, yaitu pemerintah.
 - B. distribusi kekayaan yang merata di dalam masyarakat Muslim dan adanya kepastian bahwa kekayaan tidak ditimbun sehingga menjadi sia-sia.
 - C. lebih mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan lebih mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak.
 - D. pemahaman konsep-konsep, aspek-aspek, dan aplikasinya, baik pada Ekonomi Mikro, maupun Ekonomi Makro.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Perbedaan Ekonomi Makro Islam dengan Ekonomi Makro Konvensional

A. DEFINISI EKONOMI MAKRO ISLAM MENURUT EKONOMI ISLAM

Pengertian Ekonomi Makro Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syari'atnya, dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah *Alquran Al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa arab.

Karena itu, berbagai terminologi dan subtansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai *lughawi*. Supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gamblang, tegas, dan jelas mampu memberi pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan (*Al Nudrat*) dalam upaya memecahkan problematika Ekonomi Islam.

Sebelum kita mengaji lebih jauh tentang hakikat Ekonomi Islam maka ada baiknya diberikan beberapa pengertian tentang Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli Ekonomi Islam.

a. **M. Akram Khan**

Ekonomi Makro Islam yaitu yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

b. **Muhammad Abdul Manan**

Ekonomi Makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

c. **M. Umer Chapra**

Menurut Chapra, salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Tanpa adanya keseimbangan ini maka masyarakat mungkin akan menghadapi berbagai masalah. Misalnya, ketika terlalu banyak proporsi sumber daya yang dialokasikan untuk konsumsi maka tabungan dan tingkat investasi yang ada mungkin tidak cukup untuk dapat mewujudkan *full employment* (kesempatan kerja penuh) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Lebih lanjut Chapra, menyatakan bahwa pengalokasian sumber daya untuk konsumsi yang terlalu kecil, dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya resesi dan pengangguran akibat tidak terpenuhinya permintaan konsumen. Bahkan seandainya pula sumber daya yang dialihkan untuk keperluan konsumsi secara *aggregate* mampu mencukupi, tetap terbuka kemungkinan bahwa tidak semua kebutuhan pokok tiap individu dalam masyarakat dapat dipenuhi.

Dari uraian sejarah singkat dari ekonomi makro tersebut maka definisi ekonomi makro tidaklah lagi sebagaimana definisi umum yang biasa kita kenal dalam buku-buku mengenai keduanya. Yaitu ekonomi makro disebutkan sebagai teori yang menelaah kegiatan ekonomi secara individual dari sudut pandang hubungan antara produksi, konsumsi, harga, permintaan, dan penawaran. Tidaklah demikian. Sebagaimana sejarah menyebutkan maka definisi dari ekonomi makro dapat kita definisikan dengan definisi yang lebih akurat, sebagai berikut.

Bahwa Ekonomi Makro adalah:

“Teori ekonomi yang menelaah kegiatan ekonomi antar individu dalam suatu masyarakat, yang apabila teori tersebut dipraktikkan dalam kehidupan nyata pasti akan menimbulkan masalah, yang masalah tersebut tidak akan pernah dapat terselesaikan dengan cara apa pun juga.”

Apabila ada sebuah solusi yang mampu meredam gejala masalah tersebut, pasti di kemudian hari masalah tersebut akan muncul kembali dengan permasalahan yang jauh lebih besar.

Ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, yang menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Menurut Chapra, salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makroekonominya. Tanpa adanya keseimbangan ini maka masyarakat mungkin akan menghadapi berbagai masalah. Misalnya, ketika terlalu banyak proporsi sumber daya yang dialokasikan untuk konsumsi maka tabungan dan investasi yang ada mungkin tidak cukup untuk dapat mewujudkan *full employment* (kesempatan kerja penuh) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Lebih lanjut lagi, Chapra menyatakan bahwa pengalokasian proporsi sumber daya untuk konsumsi yang terlalu kecil, dapat menyebabkan kemungkinan terjadi resesi dan pengangguran akibat tidak terpenuhinya permintaan konsumen. Bahkan seandainya pula sumber daya yang dialihkan untuk keperluan konsumsi secara agregat mampu

mencukupi, tetap terbuka kemungkinan bahwa tidak semua kebutuhan pokok tiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan proporsi sumber daya tersebut banyak dipergunakan oleh orang-orang kaya dan berkuasa untuk konsumsi barang mewah dan kurang bermanfaat, sementara proporsi sumber daya yang dialokasikan untuk barang dan jasa pemenuhan kebutuhan pokok tidak tercukupi.

Dengan demikian, alokasi sumber daya tidak cukup hanya untuk menghasilkan volume konsumsi agregat yang tepat dan sebuah keseimbangan antara tabungan dan investasi, melainkan juga diperlukan untuk memberikan kontribusi kepada pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu di satu pihak dan pada penciptaan *full employment* serta pertumbuhan ekonomi yang optimum di pihak lain. Di samping itu, distribusi pendapatan yang merata dan stabilitas ekonomi juga harus direalisasikan agar semua individu dalam masyarakat menikmati kehidupan yang sejahtera.

B. PRINSIP EKONOMI MAKRO ISLAM

Sebagai agama Allah, Islam mengatur kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat karena perekonomian merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tertera dalam Alquran dan As-Sunnah, dan keduanya menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan kedua sumber itu menjadikan Islam sebagai agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif Ekonomi Islam, segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Alquran al Karim dan As Sunnah Nabawiyah.

Ekonomi dalam Islam berbeda dengan sistem ekonomi yang lain dari segi tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem itu berusaha untuk memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem, yaitu kapitalis dan komunis. Lebih jelasnya bahwa ekonomi Islam didasarkan pada Alquran dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam seperti berikut.

1. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah, manusia hanya lah menjadi *khalifah* yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya.
2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah* Allah maka manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.

Beriman pada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem Ekonomi Islam. Karena dengan keyakinan ini, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali. Sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah.

C. ARTI PENTINGNYA EKONOMI MAKRO ISLAM

Dalam ekonomi makro terdapat beberapa persoalan yang perlu diatasi agar persoalan tersebut tidak bertambah parah. Persoalan-persoalan tersebut, yaitu

1. Pengangguran

Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan mengakibatkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Di samping itu, juga dapat mengganggu taraf kesehatan seseorang tersebut. Pengangguran yang berkepanjangan akan menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi diri penganggur dan keluarganya.

Apabila keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Nyatalah bahwa masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja merupakan tanggung jawab penting suatu perekonomian. Di samping itu, kebijakan pemerintah sangat penting. Artinya, dalam memengaruhi kegiatan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

Pengangguran adalah seorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal, yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. (Nafan, 2013)

Berikut ini beberapa penyebab terjadinya pengangguran, (Nafan, 2013).

- a. Penduduk relatif banyak, sedangkan kesempatan kerja/lapangan kerja relatif rendah.
- b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah.
- c. Teknologi yang semakin maju yang belum terimbangi oleh kemampuan manusia.
- d. Pengusaha yang selalu ingin mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan rasionalis sehingga tenaga kerja dipaksa untuk bekerja seoptimal mungkin untuk mengejar target.
- e. Adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim.

Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut (Sukirno, 2011, hal. 330-331).

a. Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran terbuka dapat pula sebagai wujud dan akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari

kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan industri.

b. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini terutama terwujud di sektor pertanian dan jasa. Di banyak negara berkembang sering kali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatan dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga besar yang mengerjakan luas tanah yang kecil.

c. Pengangguran bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan, dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d. Setengah menganggur

Di negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam Bahasa Inggris: *underemployed*. Jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

Berdasarkan data BPS terlihat meskipun laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1997 cenderung meningkat, namun angka pengangguran juga meningkat. Pada tahun 2005 pertumbuhan di Indonesia naik cukup signifikan dari 5,03 persen tahun 2003 meningkat menjadi 5,69 persen pada tahun 2005. Namun, kenaikan pertumbuhan ini ternyata belum mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tambahan angkatan kerja, akibatnya jumlah pengangguran justru meningkat dari 10,25 juta atau sekitar 9,56 persen pada tahun 2003 menjadi 10,85 juta jiwa sekitar 11,24 persen dari total angkatan kerja dari tahun sebelumnya. (Jonaidi, Volume 1, Nomor 1 April 2012)

Dalam perspektif Islam kerja (*'amal*) menyangkut segala aktivitas kegiatan manusia, baik yang bersifat badaniah, maupun rohaniah yang dimaksudkan untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara syar'i. Ketika seseorang tidak mau mempergunakan potensinya maka itu lah pengangguran yang amat membahayakan diri dan masyarakatnya. Secara moral Islam orang yang demikian

adalah menganggur yang memikulkan dosa. Sedangkan yang terus memfungsikan potensinya, baik modal, tenaga, maupun pikirannya tidak termasuk kategori menganggur yang menyalahi ajaran Islam. Ketika seseorang tidak bekerja, namun ia masih terus berfikir keras bagaimana bisa memproduktivitas dirinya sehingga bisa menghasilkan kerja yang produktif maka ia secara moral Islam memenuhi kewajiban kerja dalam Islam dan tidak menanggung dosa penganggur. (Naf'an, 2013)

Penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor individu dan faktor sistem sosial dan ekonomi (Naf'an, 2013, hal. 138-139).

- a. Faktor individu terdiri atas kemalasan, cacat/udzur, dan rendahnya pendidikan dan keterampilan.
- b. Faktor sistem sosial dan ekonomi, merupakan faktor penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia, diantaranya ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, pengembangan sektor ekonomi non-riil, banyaknya tenaga kerja wanita.

Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan meningkat. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal ini akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah diimpikan. Hal ini karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, dan kestabilan politik, seperti berikut (Naf'an, 2013, hal. 147-149).

- a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Karena pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya).
- b. Pengangguran menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak, khususnya pajak penghasilan akan berkurang.
- c. Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga permintaan terhadap barang hasil produksi berkurang.
- d. Pengangguran menambah beban pengeluaran negara karena jika tidak bekerja maka tidak mampu memenuhi kebutuhan, jadi pemerintah menyalurkan beras untuk orang miskin (RASKIN) bantuan tunai langsung (BLT), tentunya mengurangi pendapatan negara.
- e. Pengangguran menyebabkan ketidakpuasan rakyat sehingga menimbulkan demonstrasi, bahkan huru-hara sehingga keadaan politik menjadi tidak stabil.
- f. Upah yang rendah mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa rendah dan jumlah pendapatan yang dikonsumsi masyarakat rendah dan bahkan tidak menabung.

- g. Investasi dan pembentukan modal rendah.
- h. Dampak sosial pengangguran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual, dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian, Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari fisik kepada manusia. (Naf'an, 2013, hal. 252-253)

Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan *khalifah* dalam meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil, baik di bidang pertanian dan kehutanan, dan tambang, maupun meningkatkan volume perdagangan. (Naf'an, 2013, hal. 142).

Di sektor pertanian, di samping intensifikasi juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Karena itu, para petani yang tidak memiliki lahan atau modal dapat mengerjakan lahan yang diberikan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun oleh pemiliknya seperti yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Ketika berada di Madinah. Dalam sektor industri *khalifah* akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain. Selama ini negara-negara Barat selalu berusaha menghalangi tumbuhnya industri alat-alat di negeri-negeri kaum muslim agar negeri-negeri kaum muslim hanya menjadi pasar bagi produk mereka. Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, *khalifah* sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Selama ini, ketiga sektor ini banyak diabaikan atau diserahkan kepada swasta sehingga belum optimal dalam menyerap tenaga kerja. (Naf'an, 2013, hal. 145)

2. Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah

jumlah modal, dan teknologi yang digunakan semakin berkembang. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, pengalaman kerja, dan pendidikan yang semakin menambah keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi jangka panjang di setiap periode suatu masyarakat akan menambah kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam setiap periode jumlah tenaga kerja akan bertambah karena ada golongan penduduk yang memasuki angkatan kerja. Investasi masa lalu akan menambah barang-banrang modal dan kapasitas memproduksi masa kini.

Ekonomi Makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menitikberatkan pembahasan mengenai perekonomian secara keseluruhan (agregatif). Setiap perekonomian menghadapi masalah yang sangat mendasar, yakni sumber daya yang terbatas. Pada umumnya, setiap perekonomian berusaha memaksimalkan tersedianya lapangan kerja dan *output* nasional, pertumbuhan ekonomi, dan berusaha menjaga kestabilan tingkat harga. Untuk memaksimalkan *output* nasional akan mendorong tersedianya lapangan kerja (kesempatan kerja) yang tinggi. Perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Penduduk selalu bertambah, keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, dan usaha menciptakan pemerataan ekonomi dan stabilitas ekonomi melalui redistribusi pendapatan. (Soeretno, 2000, hal. 3-5)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi adalah masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Setiap negara mempunyai kesempatan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi oleh karena faktor-faktor produksi bertambah dari satu periode ke periode lainnya dan oleh karenanya pendapatan nasional dapat ditingkatkan. (Sukirno, 2011, hal. 9-10).

Pendapatan nasional adalah salah satu variabel penting dalam pembahasan ekonomi makro. Istilah pendapatan nasional merupakan terjemahan dari *national income* (lengkapnya *National Income Accunts*). Pendapatan nasional tidak hanya menghitung pendapatan secara nasional saja, tetapi menghitung pengeluaran secara nasional, bahkan produk barang dan jasa secara nasional. Perhitungan tersebut dilakukan secara periodik, biasanya dalam satuan waktu tahunan atau kuartalan. Karena pendapatan nasional dapat berarti seluruh pendapatan, seluruh pengeluaran, atau seluruh produksi barang dan jasa maka perhitungannya dapat dilakukan berdasarkan jika jenis kegiatan ekonomi tersebut. (Soeretno, 2000, hal. 19)

Dalam ilmu ekonomi ada enam macam konsep pendapatan nasional, sebagai berikut.

- a. Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Income* (GNP)
 Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Income* (GNP) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik negara tersebut dan asing.
 Hasil produksi dari setiap lapangan usaha tersebut dijumlahkan dalam satu tahun lalu dikalikan harga satuan masing-masing maka rumusnya adalah

$$Y = (Q_1.P_1) + (Q_2.Q_2) + \dots (Q_n.P_n)$$

 Keterangan:
 Y = pendapatan nasional produk domestik bruto
 Q = jumlah barang
 P = harga barang
- b. Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP)
 Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai dari akhir keseluruhan barang/jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut.
 Perhitungan nilai PDB dapat dilakukan atas dua macam dasar harga, yaitu:
- 1) PDB atas dasar harga berlaku pada tahun tersebut berfungsi untuk melihat dinamika/perkembangan struktur ekonomi yang riil pada tahun tersebut.
 - 2) PDB atas dasar harga konstan yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tertentu, berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Contohnya jika kita ingin mengetahui berapa persen kenaikan PDB dari tahun 1998, 1999, dan tahun 2000, karena nilai/harga suatu produk tiap tahun berubah-ubah maka kita harus mengubah nilai PDB tahun 1998 dan 1999 dengan dasar harga tahun 2000 sehingga akan terlihat dengan jelas besaran kenaikan dari tiap tahunnya.
- c. Produk Nasional Neto (PNN) atau *Nett National Product* (NNP)
Net National Product atas dasar harga pasar, yaitu GNP dikurangi depresiasi/penyusutan atas barang modal dalam proses produksi selama satu tahun.
 Persamaan matematikanya:

$$NNP = GNP - \text{Depresiasi}$$

 Contoh:
 Pada tahun 2003 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 2.007.191,1 miliar rupiah dan depresiasi/penyusutan sebesar 104.337,9 miliar maka:

$$NNP = 2.007.191,1 - 104.337,9 = 1.992.853,2 \text{ miliar.}$$

d. Pendapatan Nasional (PN) atau *National Income* (NI atau NY)

Net National Product (NNP) atau Dasar Biaya Faktor Produksi atau Pendapatan Nasional Neto atau *Net National Income* (NNI) adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah, atau jika kita menghitung dari GNP dapat kita rumuskan:

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Depresiasi} - \text{Pajak tidak langsung}$$

Contoh:

Pada tahun 2003 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 2.007.191,1 miliar rupiah, sedangkan depresiasi/penyusutan sebesar 104.337,9 miliar dan pajak tidak langsung dikurangi subsidi sebesar 85.272,2 miliar maka:

$$\begin{aligned}\text{NNT} &= 2.007.191,1 - 104.337,9 - 85.272,2 \\ &= 1.817.519 \text{ miliar}\end{aligned}$$

e. Pendapatan Perseorangan (*Personal Income*)

Adalah pendapatan yang diterima oleh setiap lapisan masyarakat dalam satu tahun. Pendapatan nasional tidak selamanya diterima oleh pemilik faktor produksi karena ada sebagian pendapatan yang tidak dibagikan, antara lain: laba yang ditahan, pajak perseorangan, iuran jaminan sosial, dan transfer *payment*/bantuan sosial (misalnya untuk masyarakat miskin, penyandang cacat, veteran, dan lain-lain).

Rumusan untuk menghitung PI adalah:

$$\text{PI} = \text{NNI} - (\text{laba ditahan} + \text{pajak perseorangan} + \text{iuran jaminan sosial} + \text{transfer payment}).$$

f. Pendapatan Bersih setelah Pajak (*Disposable Income*)

Adalah pendapatan pribadi/perseorangan (*personal income*) yang siap digunakan, baik untuk keperluan konsumsi, maupun ditabung setelah dikurangi pajak langsung (pajak penghasilan).

Rumusan untuk menghitung DI adalah:

$$\text{DI} = \text{PI} - \text{Pajak Langsung}$$

Dalam analisis makro ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara, yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti perkembangan jumlah dan produk barang industri, infrastruktur, pertambahan jumlah fasilitas publik, pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya. Jadi, perkembangan ekonomi dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan

ekonomi terjadi bila ada kenaikan *output* per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output* riil per orang. (Naf'an, 2013)

Dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah (Naf'an, 2013).

a. Sumber daya yang dapat dikelola (*Invisible Resources*)

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aset fisik tersebut antara lain tanaman industri, mesin, dan sebagainya. Hal ini digunakan untuk meminimalisir beban hutang yang berbasis bunga dan menyelamatkan generasi akan datang dari ketergantungan dengan Barat.

b. Sumber daya manusia (*Human Resources*)

Faktor penentu lainnya yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Manusia lah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kualitas tersebut harus dipenuhi tidak dapat berdiri sendiri. Prinsip Islam terlihat berbeda dengan *mainstream* ekonomi konvensional yang hanya menekankan pada aspek kualitas profesional dan mengabaikan kualitas moral. Moral selama ini dianggap merupakan rangkaian yang hilang dalam kajian Islam maka Islam mencoba mengembalikan nilai moral tersebut.

c. Wirausaha (*Entrepreneurship*)

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Menurut M. Umer Chapra, dalam bukunya *Islam and Economic Development*, bahwa salah satu cara yang paling kontradiktif dalam mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan adalah dengan membuat masyarakat dan individu untuk mampu semaksimal mungkin menggunakan kreasi dan artistiknya secara profesional, produktif, dan efisien. Peran wirausahaan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat terbantahkan. Kalangan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi, walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

d. Teknologi (*Technologi*)

Kemajuan teknologi mencakup dua aspek, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada.

Islam tidak menentang konsep tentang perubahan teknologi seperti digambarkan di atas, bahkan dalam kenyataannya Islam mendukung kemajuan teknologi.

Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan di banyak negara di dunia, syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi-kondisi di negara berkembang termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagi Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, yang hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan PBS, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2009 tercatat masih cukup besar, yakni sekitar 32,5 juta jiwa atau lebih kurang 14,2 persen. Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan, pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk, dan ketidakterseidannya infrastruktur, maupun pelayanan publik yang memadai (Jonaidi, Volume 1, Nomor 1 April 2012).

Secara teoritis, upaya mengentaskan kemiskinan menyaratkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan kebijakan perluasan kesempatan kerja (mengurangi tingkat pengangguran) dan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi (Jonaidi, Volume 1, Nomor 1 April 2012).

3. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh yang disebabkan oleh penawaran uang yang berlebihan, kenaikan gaji, ketidakstabilan politik, dan kemerosotan nilai mata uang. Selain itu, dalam (Hartono, 2006) mengatakan bahwa inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa umum secara berkelanjutan atau *sustainable*.

Inflasi sering kali berbentuk kenaikan tingkat harga secara gradual daripada ledakan kekacauan ekonomi. Meningkatnya laju inflasi mengakibatkan menurunnya tingkat penjualan pada perusahaan publik sehingga laba yang diterima juga menurun. Inflasi memengaruhi perekonomian melalui pendapatan dan kekayaan, dan melalui perubahan tingkat dan efisiensi produk. Inflasi yang tidak bisa diramalkan biasanya menguntungkan para debitur, pencari dana, spekulator, pengambil risiko. Inflasi akan merugikan para kreditur, kelompok berpendapatan tetap, dan infertor yang tidak berani berisiko. Pasar dikatakan efisien apabila terdapat korelasi antara harga saham dengan informasi pasar. Investor tidak hanya mampu menelaah informasi kinerja perusahaan, tetapi juga informasi keadaan pasar. Informasi pasar berupa peningkatan inflasi mengindikasikan bahwa pasar dalam kondisi yang tidak sehat sehingga risiko untuk investasi menjadi meningkat. Tingkat inflasi tentunya akan memengaruhi keputusan

investor dalam melakukan investasi saham. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada penurunan harga saham, sementara inflasi yang rendah akan berakibat pertumbuhan ekonomi menjadi lamban, dan pada akhirnya harga saham akan bergerak dengan lamban. Tingkat inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa risiko untuk berinvestasi cukup besar sehingga permintaan terhadap saham akan menurun. (Haadurat, 2013, hal. 120)

Dalam wikipedia, inflasi didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Kenaikan harga dari 1 atau 2 barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sementara itu pada ekonomi moderen mendefinisikannya sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi, yaitu kecenderungan terjadinya penurunan harga umum dan terus menerus.

Ekonomi aliran Keynesian yakin bahwa inflasi bisa terjadi terlepas dari pengaruh kondisi moneter. Ekonomi lain lebih menitik beratkan pada faktor-faktor institusional seperti suku bunga ditentukan oleh para politisi atau bank sentral yang independen dan apakah bank sentral menentukan suatu target inflasi. Pada masa kini, nilai intrinsik uang lebih rendah daripada nilai nominalnya. Hal itu terjadi salah satu penyebab inflasi. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*), yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Kalangan *monetaris* menganggap bahwa untuk menyetabilkan harga-harga, pertumbuhan jumlah uang yang beredar harus dikontrol secara hati-hati. Namun, hal ini sulit diimplementasikan karena hubungan antara ukuran-ukuran uang beredar yang diidentifikasi oleh kalangan-kalangan *monetaris* dengan tingkat inflasi biasa rusak setelah mengambil keputusan menargetkan inflasi itu.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*), yaitu tingkat perubahan harga umum, dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = [(Deflator PDB_t / Deflator PDB_{t-1}) - 1] \times 100\%$$

Para ekonom cenderung lebih senang menggunakan “*Implicit Gross Domestic Product Deflator/Deflator PDB*” atau *GDP Deflator* untuk melakukan pengukuran tingkat inflasi. *GDP Deflator* adalah rata-rata harga dari seluruh barang tertimbang dengan kualitas barang-barang tersebut yang betul-betul dibeli. Penghitungan dari *GDP Deflator* ini sangat sederhana, persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Deflator PDB} = (PDB \text{ Nominal} / PDB \text{ Riil}) \times 100$$

Untuk dapat mengerti apa dan bagaimana inflasi, perlu dipahami bahwa uang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut dalam perekonomian, media pertukaran, pengukuran nilai, unit perhitungan dan akuntansi, penyimpanan nilai, dan *instrumen terms of payment*. (Naf'an, 2013)

Pada zaman orde lama, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, terutama pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an pernah mengalami inflasi hingga 600%. Tingginya tingkat inflasi di Indonesia pada periode tersebut, menurut banyak peneliti, terutama disebabkan oleh jumlah uang beredar di dalam negeri yang terlalu banyak dan akibat defisit neraca pembayaran Indonesia. Jumlah uang beredar pada zaman orde lama boleh dikatakan hampir tidak terkendali terutama untuk membiayai defisit keuangan pemerintah pada saat itu yang disebabkan oleh besarnya biaya perjuangan dalam merebut kembali Irian Jaya, membasmi pemberontakan di beberapa provinsi dan konfrontasi dengan Malaysia (tambunan, 1996, hal 113). Bahwa pada awal tahun 1970-an, inflasi di dalam negeri bisa ditekan hingga mencapai 6,6% pada tahun 1972. Walaupun pada tahun 1974 naik lagi hingga mencapai 41% dan turun sampai mencapai 8,1% pada tahun 1978. (Soeretro, 2000)

Islam tidak mengenal istilah inflasi karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Syekh An Nabhani, 2001: 47 memberikan beberapa alasan mengapa dinar dan dirham merupakan mata uang yang sesuai. Beberapa diantaranya sebagai berikut.

- a. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah.
- b. Rasulullah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar mata uang.
- c. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan emas dan perak.
- d. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tetapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.

Penurunan nilai emas dan perak masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tetapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Ekonomi Islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364 M-1441 M), yang merupakan salah satu murid ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam 2 golongan, yaitu *natural inflation* dan *human error inflation*. (Naf'an, 2013)

a. *Natural inflation*

Inflasi ini disebabkan oleh sebab alami yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat (AS) atau naiknya permintaan agregat (AD), orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam mencegahnya).

$$MV = PT = Y$$

Di mana: M = jumlah uang beredar

V = kecepatan peredaran uang

P = tingkat harga

T = jumlah barang dan jasa (Q)

Y = tingkat pendapatan nasional (GDP)

Maka *natural inflation* dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa (T) yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misal T turun, sedangkan M dan V tetap maka konsekuensinya P akan naik
- 2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil, misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor sehingga secara neto terjadi impor uang yang mengakibatkan M naik, sehingga jika V dan T tetap maka P akan naik.

b. *Human eror inflation*

Inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri (Qs. Ar-Rum: 41). Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Ada pun beberapa penyebab diantaranya seperti berikut.

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and abad ad-ministration*).
- 2) Pajak yang berlebihan (*excessive text*).
- 3) *Excessive tax* dapat mengakibatkan terjadinya *efficiency loss dead weight loss*.
- 4) Percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive segnarage*). (Naf'an, 2013)

Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku di berbagai negara diakibatkan oleh banyak faktor. Di negara-negara industri pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut.

- a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, para pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan hanya menjual kepada pembeli-pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. Kedua-dua kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga.

- b. Pekerja-pekerja di berbagai ekonomi menuntut kenaikan upah. Apabila para pengusaha mulai menghadapi kesukaran dalam mencari tambahan pekerja untuk menambah produksinya, pekerja-pekerja yang ada akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. Apabila tuntutan kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadi kenaikan biaya produksi dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan akan menaikkan harga-harga barang mereka.

Kedua masalah yang diterangkan di atas biasanya berlaku apabila perekonomian sudah mendekati tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan perkataan lain, di dalam perekonomian yang sudah sangat maju, masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Di samping itu, inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari (i) kenaikan harga-harga barang yang diimpor, (ii) penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, dan (iii) kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab (Sukirno, 2011).

4. Neraca pembayaran

Neraca pembayaran adalah gambaran mengenai hubungan ekonomi yang berlaku di antara suatu negara dengan berbagai negara lain yang memberi informasi tentang nilai ekspor dan impor, transaksi jasa-jasa, aliran modal jangka panjang (penanaman modal asing), dan aliran modal jangka pendek. Definisi lain, Neraca Pembayaran adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara terhadap negara lainnya dalam kurun waktu tertentu.

Selain menyetabilkan neraca pembayaran ini, usaha lain yang biasanya dilakukan oleh suatu negara adalah menggalakkan perkembangan ekspor barang dan jasa dan meningkatkan pengaliran masuk modal jangka panjang dan jangka pendek. Suatu negara akan timbul masalah apabila suatu negara tersebut tidak menjaga kestabilan neraca pembayaran.

Salah satu kebijakan ekonomi terpenting di setiap negara adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal meliputi anggaran negara, pajak, dan neraca pembayaran yang biasanya ditangani oleh kementerian keuangan, sedangkan kebijakan moneter menjadi tanggung jawab bank sentral atau otoritas moneter dan bertujuan untuk memelihara stabilitas harga-harga, stabilitas nilai tukar mata uang tersebut serta pengembangan dan pengendalian lembaga-lembaga keuangan yang ada di suatu negara. (Drs. Zainul Arifin, 2009)

Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran data yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2011, hal. 390). Rekening-rekening Neraca Pembayaran Internasional (NPI) pada dasarnya merupakan suatu

prosedur yang secara sistematis mengatur, merangkum, dan menyatakan dampak seluruh transaksi ekonomi finansial antara penduduk suatu negara dengan penduduk dari bagian dunia lainnya selama kurun waktu tertentu. Prosedur sistematis tersebut mencatat transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan dengan model tata baku (*double-entry book keeping*) yang mempunyai sisi kredit dan debit. Total kredit dan debit akan sama bila neraca pembayaran negara tersebut dalam kondisi seimbang. (Masdjojo G. N., 2005, hal. 12)

Suatu neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi dua bagian yang utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal (Sukirno, 2011, hal. 390). Penjelasan mengenai Neraca Pembayaran Internasional, sebagai berikut (Masdjojo G. N., 2005, hal. 14-15).

- a. Rekening transaksi berjalan (*current account*), yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Rekening transaksi berjalan terdiri atas tiga bagian, antara lain:
 - 1) Neraca perdagangan (*balance of trade*), yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional.
 - 2) Jasa neraca (*services balance*), yang mencatat transaksi ekspor dan impor jasa, termasuk pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer, dan turis.
 - 3) Neraca transfer unilateral (*unilateral transfer balance*), yang mencatat hibah, baik dari perseorangan, maupun pemerintah (misalnya bantuan luar negeri dan bantuan militer). Sumber-sumber dana ditunjukkan oleh tanda positif (kredit), sedangkan penggunaan dana ditunjukkan oleh tanda negatif (debit).
- b. Rekening modal (*capital account*), yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan (perubahan portofolio dalam bentuk saham obligasi dan surat berharga internasional yang lain), maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara (baik berupa investasi asing langsung, maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun), dan kekayaan finansial jangka pendek (surat-surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun).
 Dengan demikian, transaksi dalam rekening modal diklasifikasikan sebagai:
 - 1) investasi portofolio (pembelian aset finansial dengan masa jatuh tempo lebih dari satu tahun);
 - 2) investasi jangka pendek (surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun);
 - 3) investasi asing langsung ketika terdapat kontrol manajemen, baik parsial, maupun penuh;
 - 4) pinjaman luar negeri yang dilakukan pemerintah.

Ada banyak faktor yang memengaruhi keseimbangan NPI (Neraca Pembayaran Internasional). Faktor-faktor tersebut bekerja melalui masing-masing NPI, yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Faktor-faktor yang memengaruhi neraca transaksi berjalan suatu negara sebagai berikut.

- a. Inflasi domestik: bila suatu inflasi negara naik relatif terhadap inflasi *partner* dagang utamanya, umumnya keseimbangan transaksi berjalan menurun. Ini dikarenakan konsumen dan perusahaan domestik akan cenderung mengekspor lebih banyak barang dan jasa (karena inflasi domestik tinggi) dan mengekspor lebih sedikit.
- b. Pendapatan domestik: bila pendapatan siap pakai suatu negara meningkat dalam presentase yang lebih tinggi dibanding *partner* dagang utamanya, keseimbangan transaksi berjalan umumnya menurun. Hal ini karena bila pendapatan meningkat maka konsumsi barang dan jasa juga meningkat. Termasuk konsumsi barang dan jasa dari luar negeri.
- c. Kurs mata uang asing: bila mata uang suatu negara mengalami apresiasi relatif terhadap mata uang *partner* dagang utamanya, keseimbangan transaksi berjalan biasanya menurun. Ini karena ekspor menjadi lebih mahal akibat menguatnya mata uang domestik. Konsekuensinya, permintaan luar negeri terhadap ekspor akan menurun dan sebaliknya permintaan domestik akan impor menjadi meningkat.
- d. Restiksi pemerintah: pemerintah pusat keseimbangan transaksi berjalan dengan mengenakan biaya masuk atau kuota terhadap barang-barang produksi luar negeri (tarif bea masuk adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap impor). Akibatnya, impor menjadi lebih mahal karenanya menurunkan permintaan domestik terhadap impor tersebut.

Ada pun faktor-faktor kunci yang memengaruhi keseimbangan rekening modal sebagai berikut.

- a. Suatu negara dapat mengenakan pajak penghasilan khusus terhadap investor asing yang melakukan investasi dinegara tersebut. Kebijakan ini akan cenderung mengurangi insentif dalam membeli surat-surat berharga luar negeri dan karenanya dapat meningkatnya rekening modal setidaknya dalam jangka pendek,
- b. Liberisasi atas kontrol terhadap aliran modal internasional secara bertahap.
- c. Antisipasi terhadap gerakan kurs valas oleh para investor surat berharga.

D. MODEL MAKRO EKONOMI ISLAM

Model makro ekonomi Islam merupakan abstraksi dari realitas atau teori yang disederhanakan yang menunjukkan hubungan diantara berbagai variabel ekonomi, yang terbagi menjadi variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen, yaitu variabel yang akan dijelaskan oleh sebuah model, sedangkan variabel eksogen, yaitu

variabel yang ditentukan di luar model. Tujuan model ekonomi ini, yaitu menggambarkan hubungan antara variabel ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk grafik, tabel, dan persamaan. Selain itu juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu perekonomian bekerja, memprediksi keadaan perekonomian di masa yang akan datang, dan menguji berbagai pandangan mengenai kebijakan-kebijakan yang bertentangan.

E. RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO ISLAM

Pada dataran teoritis, ada beberapa pokok bahasan ilmu makro ekonomi yang telah menjadi kajian dari sudut pandang ilmu ekonomi Islam, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Asumsi Rasionalitas dalam Ekonomi Islami
 - a. Perluasan konsep Rasionalitas melalui persyaratan transitivitas dan pengaruh infak (sedekah) terhadap utilitas.
 - b. Perluasan spektrum utilitas oleh nilai Islam tentang halal dan haram.
 - c. Pelonggaran persyaratan kontinuitas, misal permintaan barang haram ketika keadaan darurat.
 - d. Perluasan horison waktu (kebalikan konsep *time value of money*).
2. Teori Permintaan Islami
 - a. Peningkatan utilitas antara barang halal dan haram.
 - b. *Corner Solution* untuk pilihan halal-haram.
 - c. Permintaan barang haram dalam keadaan darurat (tidak optimal).
3. Teori Produksi Islami
 - a. Perbandingan pengaruh sistem bunga dan bagi hasil terhadap biaya produksi.
 - b. pendapatan, dan efisiensi produksi.
4. Teori Penawaran Islami
 - a. Perbandingan pengaruh pajak penjualan dan zakat perniagaan terhadap surplus produsen.
 - b. Internalisasi Biaya Eksternal.
 - c. Penerapan Biaya Kompensasi, batas ukuran, atau daur ulang.
5. Mekanisme Pasar Islami
 - a. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf, al-Ghazaly, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun.
 - b. Mekanisme pasar Islami dan intervensi harga Islami.
 - c. Intervensi harga yang adil dan zalim.

F. KARAKTERISTIK EKONOMI MAKRO ISLAM

Ekonomi Islam pengaturannya bersifat Ketuhanan/*Ilahiah* (*nizhamun rabbaniyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah. Jadi, berbeda dengan hukum ekonomi lainnya, yakni kapitalis (*ra'simaliyah; capitalistic*) dan sosialis (*syuyu'iyah; socialistic*) yang tata aturannya semata-mata didasarkan atas konsep-konsep/teori-teori yang dihadirkan oleh manusia (para ekonom).

Dalam Islam, ekonomi hanya merupakan satu titik bahagian dari *Al-Islam* secara keseluruhan (*juz'un min al-Islam as-syamil*). Oleh karena ekonomi itu hanya merupakan salah satu bagian atau tepatnya sub sistem dari *Al-Islam* yang bersifat komprehensif (*Al-Islam As-Syamil*) maka ini artinya tidaklah mungkin memisahkan persoalan ekonomi dari rangkaian ajaran Islam secara keseluruhan yang bersifat utuh dan menyeluruh (holistik). Misalnya saja, karena Islam itu agama akidah dan agama akhlak di samping agama *syariah* (*muamalah*) maka ekonomi Islam tidak boleh terlepas apalagi dilepaskan dari ikatannya dengan sistem akidah dan sistem akhlaq (etika) di samping hukum. Itu lah sebabnya seperti akan dibahas pada waktunya nanti, mengapa ekonomi Islam tetap dibangun di atas asas-asas akidah (*al-asas al-'aqa'idiiyyah*) dan asas-asas etika-moral (*al-asas akhlaqiiyyah*) yang lainnya.

Ekonomi berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (*al-'aqidah al-Islamiyyah*) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya. Atas dasar ini maka seorang Muslim (menjadi) terikat dengan sebagian kewajibannya, semisal zakat, sedekah, dan lain-lain, walaupun dia sendiri harus kehilangan sebagian kepentingan dunianya karena lebih cenderung untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT di hari kiamat kelak.

Berakaracter *ta'abbudi* (*thabi'un ta'abbudiyun*). Mengingat ekonomi Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan Ketuhanan (*nizham rabbani*), dan setiap ketaatan kepada salah satu dari sekian banyak aturan-aturannya adalah berarti ketaatan kepada Allah SWT, dan setiap ketaatan kepada Allah itu adalah ibadah. Dengan demikian maka penerapan aturan-aturan Ekonomi Islam (*al-iqtishad al-Islami*) adalah juga mengandung nilai-nilai ibadah dalam konteksnya yang sangat luas dan umum.

Terkait erat dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak. Itu lah sebabnya mengapa dalam Islam kita tidak akan pernah menemukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perkreditan, dan lain-lain yang semata-mata murni kegiatan ekonomi sebagaimana terdapat di dalam ekonomi non Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi sama sekali tidak boleh lepas dari kendali akhlaq (etika-moral) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan.

Elastis (*al-murunah*), dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi. Kekhususan *al-murunah* ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik Alquran maupun al-Hadits, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi, tidak memberikan doktrin ekonomi secara tekstual, akan tetapi hanya memberikan garis-garis besar yang bersifat instruktif guna mengarahkan perekonomian Islam secara global. Sedangkan implementasinya secara riil di lapangan diserahkan kepada kesepakatan sosial (masyarakat ekonomi) sepanjang tidak menyalahi cita-cita *syari`at* (*maqashid as-syari`ah*).

Objektif (*al-maudhu`iyyah*), dalam pengertian, Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak obyektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya adalah merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan, dan lain-lain. Bahkan terhadap musuh sekali pun di samping terhadap kawan dekat. Itu lah sebabnya mengapa monopoli misalnya dilarang dalam Islam. Termasuk ke dalam hal yang dilarang ialah perlakuan *dumping* dalam berdagang/berbisnis.

Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (*al-hadaf as-sami*). Berlainan dengan sistem ekonomi non Islam yang semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan materi (*ar-rafahiyah al-maddiyah*), ekonomi Islam memiliki sasaran yang lebih jauh, yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi (berkualitas) dan pendidikan kejiwaan.

Realistis (*al-waqi`iyyah*). Prakiraan (*forecasting*) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktik pada sisi yang lain. Dalam hal-hal tertentu, sangat dimungkinkan terjadi pengecualian atau bahkan penyimpangan dari hal-hal yang semestinya. Misalnya, dalam keadaan normal, Islam mengharamkan praktik jual-beli barang-barang yang diharamkan untuk mengonsumsinya, tetapi dalam keadaan darurat (ada kebutuhan sangat mendesak) pelanggaran itu bisa jadi diturunkan statusnya menjadi boleh atau sekurang-kurangnya tidak berdosa.

Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (*al-amwal*) tidaklah bersifat mutlak. Itu lah sebabnya mengapa dalam Islam pendayagunaan harta kekayaan itu tetap harus diklola dan dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan Sang Maha Pemilik, yaitu Allah SWT. Atas dalih apa pun, seseorang tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam *mentasarrufkan* (membelanjakan) harta kekayaannya, termasuk dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya.

Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdam al-mal*). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan/kepiawaian dalam mengelola atau mengatur harta kekayaannya, semisal berlaku hemat dalam berbelanja, tidak menyerahkan harta kepada orang yang belum/tidak mengerti tentang pendayagunaannya, dan tidak membelanjakan hartanya ke dalam hal-hal yang diharamkan agama, serta tidak menggunakannya pada hal-hal yang akan merugikan orang lain.

G. RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO KONVENSIOANL

1. Pengeluaran dan Pendapatan

Pengeluaran nasional adalah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, pengeluaran dan pendapatan biasanya dianggap setara dan istilah tersebut sering digunakan berganti-gantian. Pengeluaran bisa diukur sebagai jumlah pendapatan, atau bisa dilihat dari sisi produksi dan diukur sebagai jumlah nilai barang jadi dan jasa, atau dari penjumlahan seluruh nilai tambah di dalam negeri. Pengeluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan *Produk Domestik Bruto (PDB)* atau salah satu akun nasional.

2. Pengangguran

Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja. Angkatan kerja hanya memasukan pekerja yang aktif mencari kerja. Orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan atau yang tidak mendapat dukungan mencari kerja karena ketiadaan prospek kerja, tidak lah termasuk di dalam angkatan kerja.

Pengangguran sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tipe yang semuanya berkaitan dengan sebab-sebab yang berbeda pula. Pengangguran klasikal terjadi ketika gaji karyawan terlalu tinggi sehingga pengusaha tidak berani memperkerjakan karyawan lebih dari yang sudah ada. Gaji bisa menjadi terlalu tinggi karena peraturan upah minimum atau adanya aktivitas serikat pekerja. Sama halnya dengan pengangguran klasikal, pengangguran friksional terjadi apabila ada lowongan pekerjaan untuk pekerja, tetapi waktu untuk mencarinya menyebabkan adanya periode ketika si pekerja tersebut menjadi pengangguran.

Pengangguran struktural meliputi beberapa jenis penyebab pengangguran termasuk ketidakcocokan antara kemampuan pekerja dan kemampuan yang dicari oleh pekerjaan yang ada. Pengangguran besar-besaran bisa terjadi ketika sebuah ekonomi mengalami masa transisi industri dan kemampuan para pekerja menjadi tak terpakai. Pengangguran struktural itu juga cukup mirip dengan pengangguran friksional karena dua-duanya berkuat pada permasalahan ketidakcocokan kemampuan pekerja dengan lowongan pekerjaan, tetapi pengangguran struktural berbeda karena meliputi juga kebutuhan untuk menambah kemampuan diri, tidak hanya proses pencarian jangka pendek. Walaupun ada beberapa jenis pengangguran yang selalu ada saja mau bagaimana pun keadaan ekonomi pada saat itu, pengangguran siklikan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan. Hukum Okun menunjukkan hubungan empiris antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Versi asli dari Hukum Okun menyatakan bahwa 3% kenaikan keluaran ekonomi akan mengakibatkan 1% penurunan angka pengangguran.

3. Inflasi dan Deflasi

Kenaikan harga umum disebuah ekonomi disebut dengan inflasi. Ketika harga menurun maka terjadi deflasi. Ekonom mengukur perubahan harga ini menggunakan indeks harga. Inflasi bisa terjadi ketika suhu ekonomi menjadi terlalu panas dan tumbuh terlalu cepat. Mirip dengan ini, ekonomi yang merosot bisa mengakibatkan deflasi.

Bank Sentral yang mengatur ketersediaan uang suatu negara, selalu mencoba menghindari adanya perubahan tingkat harga menggunakan kebijakan moneter. Dengan menaikkan tingkat suku bunga atau menurunkan ketersediaan uang di dalam sebuah ekonomi akan menurunkan inflasi. Inflasi bisa mengakibatkan bertambahnya ketidakpastian dan konsekuensi negatif lainnya. Deflasi bisa menurunkan keluaran ekonomi. Bank sentral akan mengusahakan stabilnya harga untuk melindungi ekonomi dari akibat negatif atas fluktuasi harga.

Perubahan di tingkat harga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa pergerakan tingkat harga itu berhubungan langsung dengan penawaran uang. Fluktuasi jangka pendek bisa juga berhubungan dengan faktor moneter, tetapi perubahan pada permintaan agregat dan penawaran agregat bisa juga memengaruhi tingkat harga. Contohnya, penurunan di permintaan karena adanya resesi bisa mengakibatkan indeks harga yang rendah dan deflasi. Syok penawaran negatif, seperti krisis minyak, akan menurunkan penawaran agregat dan menyebabkan inflasi.

a. *Karakteristik Ekonomi Makro*

Karakteristik ekonomi makro sebagai berikut.

- 1) Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan/menyeluruh).
- 2) Kegiatan ekonomi yang membahas secara menyeluruh. Contohnya Pendapatan nasional, Investasi, Kesempatan kerja, Inflasi, Neraca pembayaran.
- 3) Terkonsentrasi pada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh.

b. *Tujuan Ekonomi Makro*

Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan ilmu ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Tujuan akhir ekonomi makro menurut Thomas (1997:448) ada empat variabel ekonomi makro. Ini lah yang paling berpengaruh terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan sehingga perilakunya perlu diamati dan dikendalikan. Di bawah ini diuraikan lebih rinci tentang variabel-variabel tersebut.

Price Level Stability (Stabilitas Tingkat Harga Umum)

Hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan inflasi, seperti berikut.

- 1) Mengapa inflasi perlu dikendalikan.

- 2) Apa penyebab inflasi.
- 3) Bagaimana menghitung inflasi.
- 4) Macam-macam inflasi.
- 5) Dampak inflasi.
- 6) Otoritas moneter dan inflasi.
- 7) *Inflation targeting*.
- 8) Mekanisme transmisi kebijakan moneter dan inflasi.
- 9) Kurva Phillips dan inflasi.
- 10) Inflasi dan *Fisher Equation*.
- 11) *The cost of inflation*.
- 12) Inflasi dan IPM.
- 13) Inflasi dan defisit APBN.
- 14) Pertumbuhan uang beredar, suku bunga, dan inflasi.

High Employment Level (Tingginya Tingkat Kesempatan Kerja)

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan kesempatan kerja, antara lain berikut ini.

- 1) Peran pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja.
- 2) Pendekatan *demand dan supply of labor* dalam perluasan kesempatan kerja.
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya perluasan kesempatan kerja.
- 4) *Human capital* sebagai upaya efektif perluasan kerja.
- 5) Keuangan negara dan kesempatan kerja.
- 6) Kebijakan ketenagakerjaan.
- 7) Serikat kerja.
- 8) Hubungan industrial.
- 9) Sistem ekonomi dan kesempatan kerja.
- 10) Distribusi pendapatan fungsional dan kesempatan kerja.
- 11) Laju pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja.
- 12) Pandangan terhadap penduduk.
- 13) Elastisitas kesempatan kerja.

Long-Term Economic Growth

Pertumbuhan ekonomi yang ideal, yaitu (1) berlangsung terus menerus, (2) disertai dengan terciptanya lapangan kerja, (3) tidak merusak lingkungan, (4) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk, (5) disertai dengan distribusi pendapatan yang adil, (6) kontribusi sektoral yang merata, (7) tidak meninggalkan sektor pertanian, (8) kenaikannya riil, (9) penyumbang terbesar PDB adalah warga domestik, bukan asing.

Exchange Rate Stability

Nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal, yang tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya, misalnya: (1) impor dan ekspor, (2) APBN dan APBD, (3) kesehatan dan pendidikan, (4) transportasi, (5) industri dalam negeri, (6) politik, (7) daya beli masyarakat, (8) dunia perbankan, (9) sektor pertanian, kelautan, peternakan, dan seterusnya, (10) sektor properti, dan sebagainya.

c. *Manfaat Ekonomi Makro*

Dengan mempelajari ekonomi makro maka pemerintah beserta seluruh lapisan masyarakat yang berada di bawahnya akan mengetahui kebijakan-kebijakan seperti apa yang harus diambil dalam kondisi ekonomi yang terjadi. Pemerintah akan dapat menentukan keputusan dengan cepat dan tepat. Selain itu, kita dapat mengetahui pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional, dan neraca pembayaran nasional.

d. *Indikator Ekonomi Makro*

Indikator Makro ekonomi adalah statistik yang menunjukkan status ekonomi sebuah negara tergantung pada area tertentu dari ekonomi (industri, pasar tenaga kerja, perdagangan, dan lain-lain). Indikator Makro Ekonomi diterbitkan secara berkala pada waktu tertentu. Setelah publikasi indikator ini kita bisa melihat volatilitas pasar. Tingkat volatilitas ditentukan tergantung pada pentingnya indikator. Itu lah sebabnya mengapa penting untuk memahami indikator yang penting dan apa yang menyebabkannya. Berikut ini adalah indikator-indikator penting yang dibahas dalam ekonomi makro.

1) **Pengumuman Suku Bunga**

Suku bunga memainkan peran paling penting dalam menggerakkan harga mata uang di pasar valuta asing. Sebagai lembaga yang menetapkan suku bunga, bank sentral merupakan aktor yang paling berpengaruh. Suku bunga mendikte arus investasi. Karena mata uang adalah representasi dari ekonomi suatu negara, perbedaan suku bunga memengaruhi nilai mata uang relatif dalam hubungannya dengan satu sama lain.

2) **Produk Domestik Bruto (PDB)**

PDB adalah ukuran terluas dari ekonomi suatu negara, dan hal ini mewakili total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama tahun tertentu.

Indeks Harga Konsumen (IHK) mungkin merupakan indikator inflasi yang paling penting. Indeks ini mewakili perubahan tingkat harga eceran untuk keranjang konsumen dasar. Inflasi terikat secara langsung dengan daya beli mata uang dalam negeri dan memengaruhi posisinya di pasar internasional.

3) **Indikator Ketenagakerjaan**

Indikator ketenagakerjaan mencerminkan kesehatan ekonomi atau siklus bisnis secara keseluruhan. Dalam rangka untuk memahami bagaimana ekonomi

berfungsi, penting untuk mengetahui berapa banyak pekerjaan yang diciptakan atau dihancurkan, berapa persen tenaga kerja yang aktif bekerja, dan berapa banyak orang-orang baru yang mengklaim sebagai pengangguran.

4) **Penjualan Eceran**

Indikator penjualan eceran (ritel) dirilis secara bulanan dan penting bagi pedagang valuta asing karena menunjukkan kekuatan keseluruhan belanja konsumen dan keberhasilan toko eceran.

5) **Neraca Pembayaran**

Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*) mewakili rasio antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan total operasi perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer.

6) **Kebijakan Fiskal dan Moneter Pemerintah**

Stabilisasi ekonomi (misalnya, kesempatan kerja penuh, pengendalian inflasi, dan keseimbangan pembayaran yang adil) merupakan salah satu tujuan yang berusaha untuk dicapai pemerintah melalui manipulasi kebijakan fiskal dan moneter.

e. *Pelaku Ekonomi Makro*

1) **Rumah Tangga**

Rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, *skill*, jasa tenaga kerja, maupun modal yang disalurkan melalui pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Keuntungan konsumen di sini adalah untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan yang nantinya akan dibelanjakan kembali untuk kebutuhan konsumen itu sendiri melalui pasar. Rumah tangga membeli barang dan jasa yang telah disediakan di pasar sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga tersebut dengan menentukan pilihan-pilihannya berdasarkan keterbatasan pendapatannya dan keterbatasan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

2) **Produsen**

Produsen memproduksi barang dan jasa dengan semua faktor-faktor produksi yang diperlukannya (alam, jasa/tenaga kerja, *skill*, dan modal) yang didapatkan dari pasar tenaga kerja dan pasar uang, lalu menyerahkan hasil produksinya ke pasar.

3) **Pemerintah**

Pemerintah bertugas mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah mengatur kebijakan-kebijakan dalam pasar, produsen, dan konsumen. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas jumlah produksi barang dengan jumlah konsumen, juga menjaga laju pertumbuhan ekonomi negara dan mencegah inflasi berlebihan, dengan kebijakan-kebijakan

seperti operasi pasar, melakukan ekspor impor, menjaga stabilitas harga, menentukan suku bunga, dan sebagainya. Selain mengatur pasar, pemerintah juga melakukan belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4) **Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada entitas yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan ini lah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, ketika uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan.

5) **Negara-negara Lain**

Dalam kegiatan ekonomi negara-negara lain mempunyai peran sebagai penyedia kebutuhan barang impor (*supplier*) di pasar barang dan membeli hasil-hasil ekspor dari negara kita. Negara-negara lain juga masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang (devisa) dari luar negeri (sebagai *supplier* dana) dan sebagai peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang mereka (sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan luar negeri).

H. PERBEDAAN EKONOMI MAKRO ISLAM DENGAN EKONOMI MAKRO KONVENSIONAL

Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mengkhususkan membahas mekanisme perekonomian secara keseluruhan atau global, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut.

Persoalan-persoalan pokok dalam ekonomi makro yang selalu dihadapi negara, yaitu seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional potensial dan sebenarnya, masalah pengangguran, dan masalah inflasi.

Ekonomi makro konvensional (kapitalisme) menjadikan sekulerisme yang menghalangi agama terlibat dalam kebijakan ekonomi (azas manfaat). Sedangkan ekonomi makro Islam membahas permasalahan kebijakan ekonomi berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam.

Yang membedakan ekonomi makro konvensional dengan ekonomi makro Islam, yang paling mendasar adalah ketika ekonomi makro konvensional hanya membahas masalah demi masalah secara global tanpa melihat kembali manfaat dan tujuan untuk *kemaslahatan/kesejahteraan* rakyatnya. Sedangkan dalam Makro Ekonomi Islam

mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sumber utama Ekonomi Islam adalah Alquran dan As-sunnah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya berdasarkan pada hal-hal yang bersifat *positivistic*. Ekonomi itu jihad dan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh ke luar dari konsep dan syarat-syarat ibadah. Islam lebih menekankan pada konsep *need* daripada *want* dalam menuju mashlahah, karena *need* lebih bisa diukur daripada *want*. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat. (Qs. 25: 63).

Jika dikaitkan dengan metode HAHSLM, misalnya saja penerapannya dalam ekonomi makro Islam, diasumsikan pajak itu diganti dengan zakat. Maka dapat ditarik kesimpulannya seperti ini:

$$(H) = (A) (H) (S) (L) (M)$$

Maka,

$$(\text{Pemerintah}) = (\text{Zakat}) (\text{Aqidah}) (\text{Individu}) (\text{Negara}) (\text{Kemashlahatan})$$

Pemerintah menerapkan sistem zakat sebagai pengganti pajak, ketika masyarakat (manusia) pasti lah harus memiliki aqidah yang akan dikeluarkan secara individu, yang akan dikelola oleh negara, dengan tujuan *kemashlahatan* bagi masyarakat di negara tersebut.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakan lah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian Ekonomi Makro Islam!
- 2) sebutkan dan jelaskan persoalan-persoalan yang perlu diatasi dalam ekonomi makro!
- 3) Jelaskan perbedaan yang paling mendasar antara Ekonomi Makro Konvensional dengan Ekonomi Makro Islam!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian Ekonomi Makro Islam. (halaman 1.36)

Bahwa Ekonomi Makro adalah:

“Teori ekonomi yang menelaah kegiatan ekonomi antar individu dalam suatu masyarakat, yang apabila teori tersebut dipraktikkan dalam kehidupan nyata pasti akan menimbulkan masalah, yang masalah tersebut tidak akan pernah dapat terselesaikan dengan cara apapun juga.”

Apabila ada sebuah solusi yang mampu meredam gejala masalah tersebut, pasti di kemudian hari masalah tersebut akan muncul kembali dengan permasalahan yang jauh lebih besar.

- 2) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan arti pentingnya Ekonomi Makro Islam. (halaman 1.65)

Dalam ekonomi makro terdapat beberapa persoalan yang perlu diatasi agar persoalan tersebut tidak bertambah parah. Persoalan-persoalan tersebut seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional potensial dan sebenarnya, masalah pengangguran, dan masalah inflasi.

- 3) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan Perbedaan Ekonomi Makro Islam dengan Ekonomi Makro Konvensional. (halaman 1.65)

Yang membedakan Ekonomi Makro Konvensional dengan Ekonomi Makro Islam, yang paling mendasar adalah ketika Ekonomi Makro Konvensional hanya membahas masalah demi masalah secara global tanpa melihat kembali manfaat dan tujuan untuk *kemaslahatan/kesejahteraan* rakyatnya. Sedangkan dalam Makro Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sumber utama Ekonomi Islam adalah *Alquran dan As-sunnah*, berbeda dengan Ekonomi Konvensional yang hanya berdasarkan pada hal-hal yang bersifat *positivistic*.



Rangkuman

Ekonomi berasal dari bahas Yunani ‘oikonomos atau oikonomis’ yang berarti manajemen urusan rumah tangga yang khusus penyediaan dan administrasi pendapatan. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu cabang sosial yang mempelajari suatu sumber daya manusia yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu ilmu ekonomi yang mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan berdasarkan *Alquran dan As-Sunnah*. Ekonomi makro adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari variabel-variabel secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel itu meliputi pendapatan nasional, kesempatan kerja, atau pengangguran, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, maupun neraca pembayaran internasional.

Ekonomi Makro adalah ilmu ekonomi yang mengkhususkan membahas mekanisme perekonomian secara keseluruhan atau global, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut.

Persoalan-persoalan pokok dalam ekonomi makro yang selalu dihadapi negara, yaitu seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional potensial dan sebenarnya, masalah pengangguran, dan masalah inflasi.

Ekonomi Makro Konvensional (kapitalisme) menjadikan *sekulerisme* yang menghalangi agama terlibat dalam kebijakan ekonomi (azas manfaat). Sedangkan Ekonomi Makro Islam membahas permasalahan kebijakan ekonomi berupa pengelolaan dan pengadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Yang membedakan ekonomi makro konvensional dengan ekonomi makro Islam, yang paling mendasar adalah ketika ekonomi makro konvensional hanya membahas masalah demi masalah secara global tanpa melihat kembali manfaat dan tujuan untuk *kemaslahatan/kesejahteraan* rakyatnya. Sedangkan dalam Makro Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sumber utama Ekonomi Islam adalah *Alquran dan As-sunnah*, berbeda dengan Ekonomi Konvensional yang hanya berdasarkan pada hal-hal yang bersifat *positivistic*. Ekonomi itu jihad dan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh ke luar dari konsep dan syarat-syarat ibadah. Islam lebih menekankan pada konsep *need* daripada *want* dalam menuju *mashlahah*, karena *need* lebih bisa diukur daripada *want*. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat. (Qs. 25: 63).

Jika dikaitkan dengan metode HAHSLM, misalnya saja penerapannya dalam Ekonomi Makro Islam, diasumsikan pajak itu diganti dengan zakat. Maka dapat ditarik kesimpulannya seperti ini:

$$(H) = (A) (H) (S) (L) (M)$$

Maka,

$$(Pemerintah) = (Zakat) (Aqidah) (Individu) (Negara) (Kemaslahatan)$$

Pemerintah menerapkan sistem zakat sebagai pengganti pajak, ketika masyarakat (manusia) pasti lah harus memiliki aqidah yang akan dikeluarkan secara individu, yang akan dikelola oleh negara, dengan tujuan *kemashlahatan* bagi masyarakat di negara tersebut.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ekonomi Islam tidak boleh terlepas apalagi dilepaskan dari ikatannya dengan,, dan
 - A. sistem ekonomi, sistem informasi, dan politik.
 - B. sistem pajak, sistem bunga, dan perdagangan.
 - C. sistem akidah, sistem akhlaq (etika), dan hukum.
 - D. sistem kapitalisme, sosialisme, dan agama.

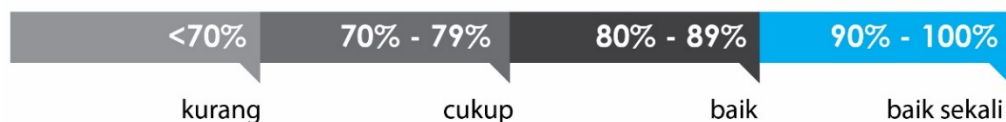
- 2) Persoalan-persoalan pokok dalam ekonomi makro yang selalu dihadapi negara seperti *kecuali*
 - A. pertumbuhan ekonomi
 - B. pendapatan nasional potensial dan sebenarnya
 - C. masalah pengangguran
 - D. masalah deflasi

- 3) Tujuan model ekonomi makro Islam, yaitu *kecuali*
- menggambarkan hubungan antara variabel ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk grafik, tabel, dan persamaan
 - menjelaskan bagaimana suatu perekonomian bekerja
 - memprediksi keadaan perekonomian di masa yang lalu
 - menguji berbagai pandangan mengenai kebijakan-kebijakan yang bertentangan
- 4) Model makro ekonomi Islam merupakan abstraksi dari realitas atau teori yang disederhanakan yang menunjukkan hubungan diantara berbagai variabel ekonomi, yang terbagi menjadi
- variabel endogen dan variabel eksogen.
 - variabel dependent dan independent
 - variabel bebas dan terikat
 - variabel konsumsi dan produksi
- 5) Salah satu variabel penting dalam pembahasan ekonomi makro
- pendapatan nasional
 - pertumbuhan ekonomi
 - pengangguran
 - inflasi dan deflasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Filsafat Ekonomi Makro Islam

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*). Kesempurnaan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek *mu'amalah* yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Alquran secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut. Ini dapat dilihat dalam beberapa ayat, seperti pada surat Al An'am ayat 38, "Sedikit pun tidak kami lupakan di dalam kitab suci Alquran (QS. 6:38); surat Al-Maidah ayat 3 "Pada hari ini Kusempurnakan bagi kamu agamamu dan Kusempurnakan bagi kamu nikmatKu dan Aku ridho Islam itu sebagai agama kamu". Dalam ayat lainnya Allah berfirman, "*Kami menurunkan Alquran untuk menjelaskan segala sesuatu*" (QS.16:89).

Kesempurnaan Islam ini tidak saja disebutkan dalam Alquran, namun juga dapat dirasakan baik itu oleh para ulama dan intelektual muslim sampai kepada non muslim. Seorang orientalis paling terkemuka bernama H.A.R Gibb mengatakan, "*Islam is much more than a system of theologi its a complete civilization*" (Islam bukan sekedar sistem theologi, tetapi merupakan suatu peradaban yang lengkap). Sehingga menjadi tidak relevan jika Islam dipandang sebagai agama ritual *an sich*, apalagi menganggapnya sebagai sebuah penghambat kemajuan pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan yang demikian, disebabkan mereka belum memahami Islam secara utuh.

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu *aqidah*, *syari'ah*, dan *akhlak*. Hubungan antar *aqidah*, *syari'ah*, dan *akhlak* dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif.

Aqidah adalah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, Malaikat, Rasul, Kitab, dan rukun iman lainnya. Akhlak adalah ajaran Islam tentang perilaku baik-buruk, etika, dan moralitas. Sedangkan syariah adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Syariah Islam terbagi kepada dua, yaitu ibadah dan *muamalah*. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. *Muamalat* dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Alquran dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Contoh variabel yang dapat berkembang antara lain aplikasi prinsip *mudharabah* dalam bank atau asuransi.

Pada masa dahulu aplikasinya sangat sederhana dan berlangsung antara dua pihak. Pada masa sekarang ketika *mudharabah* masuk dalam dunia perbankan aplikasinya mengalami pengembangan. Demikian pula penerapan *bai' istishna'* dalam pembangunan suatu proyek. Ini adalah pengembangan dari konsep jual biasa yang diajarkan Alquran dan Sunnah. Tugas cendekiawan muslim sepanjang sejarah adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, ciri khas aspek *muamalat* (ekonomi) adalah cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat. Ajaran *muamalat* khususnya dalam ekonomi lebih tampak sifat universalnya. Hal ini karena dalam *bermuamalat* di bidang ekonomi tidak membedakan muslim dan nonmuslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diucapkan oleh Khalifah Ali:

“Dalam bidang muamalat kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”.

A. FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya.

Filsafat Ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*: yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam ini lah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi

manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan.

Dalam Ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber Alquran dan Hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai ini lah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam.

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada fondasi utama, yaitu *tauhid*. Fondasi berikutnya, adalah *syariah*, dan *akhlak*. Pengamalan *syariah* dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi *syariah* dan akhlak terganggu. Dasar *syariah* membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah *syariah*. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak lah yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk *good corporate governance* dan *market diciplin* yang baik.

Dari fondasi ini muncul 10 prinsip derivatif sebagai pilar ekonomi Islam. Pembahasan komperhensif mengenai prinsip-prinsip ini selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail di bawah ini:

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. (39 : 38).

Hakikat tauhid juga dapat berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Landasan filosofis ini lah yang membedakan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya keharusan setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah, dan akhirnya ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah.

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. *Pertama*, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah (*trustee*) untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.

Salah satu contoh praktik ekonomi saat ini yang bertentangan dengan Tauhid adalah bunga. Bunga (*interest*) yang memastikan usaha harus berhasil (untung) bertentangan dengan tauhid. Firman Allah, “*Seseorang tidak bisa memastikan berapa*

keuntungannya besok”, (Ar-Rum: 41). Padahal setiap usaha mengandung tiga kemungkinan, yaitu untung, impas, atau rugi. Lebih dari itu, tingkat keuntungan itu pun bisa berbeda-beda, bisa besar, sedang, atau kecil. Jadi, konsep bunga benar-benar tidak sesuai dengan *syariah* karena bertentangan dengan prinsip tauhid.

Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai *khalifah*, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya, sebagaimana dalam firmanNya “*Dan jika kamu menghitung – hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya*”. (QS. 14: 34)

Berbeda dengan pandangan di atas, para ahli ekonomi konvensional selalu mengemukakan jargon bahwa sumber daya alam terbatas (*limited*). Karena itu, menurut Ekonomi Islam, krisis ekonomi yang dialami suatu negara, bukan karena terbatasnya sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi (*maldistribution*), sehingga terwujud ketidakadilan sumber daya (ekonomi).

Selanjutnya, konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, termasuk dalam menggunakan sarana dan sumber daya harus disesuaikan dengan *syariat* Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor – impor idealnya harus bertitik tolak dari tauhid (keilahian) dan berjalan dalam koridor *syariah* yang bertujuan untuk menciptakan *falah* dan ridha Allah.

Seorang muslim yang bekerja dalam bidang produksi misalnya maka itu tidak lain diniatkan untuk memenuhi perintah Allah. “*Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan*”. (QS. Al-Mulk: 15).

Demikian pula ketika berdagang, bekerja di pabrik atau perusahaan. Semuanya dalam bingkai ibadah kepada Allah. Makin tekun seseorang bekerja, makin tinggi nilai ibadah dan takwanya kepada Allah. Demikian gambaran seorang muslim yang menganggap bahwa pekerjaannya itu adalah ibadah kepada Allah.

Aspek tauhid dalam produksi akan tercermin dari *output* yang dihasilkan. Seseorang yang memproduksi dengan nama Allah maka barang yang diproduksi akan terjaga kebaikan dan kehalalannya. Sehingga mereka tidak akan memproduksi barang-barang yang membawa *mudharat* seperti rokok, miras, apalagi narkoba serta barang-barang haram lainnya. Termasuk juga dalam proses produksi barang-barang halal.

Tidak hanya dalam aspek produksi, aspek tauhid pun idealnya dimiliki seorang muslim yang hendak membeli, menjual, dan meminjam. Ia selalu tunduk pada aturan-aturan *syariah*. Ia tidak membeli atau menjual produk dan jasa-jasa haram, memakan uang haram (riba), memonopoli milik rakyat, korupsi, atau pun melakukan suap menyuap.

Ketika seorang muslim memiliki harta dan ingin menginvestasikannya agar produktif, ia tidak akan menginvestasikannya secara ribawi di lembaga-lembaga

finansial yang berbasis bunga. Ia juga tidak akan menggunakannya untuk bisnis spekulasi di pasar modal atau pasar uang (*money changer dan bank devisa*). Seorang muslim akan menginvestasikannya berdasarkan prinsip-prinsip *syariah* seperti *skim mudhabarah, musyarakah, dan bentuk investasi syariah lainnya*.

Prinsip konsumsi yang sesuai syariah salah satunya adalah tidak berlebih-lebihan, menjauhi *israf (mubazzir)*. Perilaku tersebut dilarang dalam agama Islam. (QS.17:36) Meskipun sumber daya yang tersedia cukup banyak, manusia sebagai *khalifah* Allah tidak boleh boros dan serakah dalam menggunakannya. Boros adalah perbuatan setan (QS.17:27) dan serakah adalah perilaku binatang. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya haruslah dilakukan secara efisien dan memikirkan kepentingan generasi mendatang serta memperhatikan lingkungan.

Seorang muslim sejati, meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan memanfaatkannya sendiri karena dalam Islam setiap muslim yang mendapat harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat sesuai dengan aturan *syariah*. Masyarakat berhak untuk menerima distribusi itu. Kekayaan moral (akhlak) ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi sebagaimana yang digambarkan di atas tidak muncul dalam sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan mekanisme pasar. Karena menurut faham ini, ekonomi merupakan ranah yang bebas dari nilai-nilai, termasuk moral dan agama.

Prinsip Tauhid sebagaimana dijelaskan pada bagian ini memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang lain seperti keadilan, persamaan, distribusi, dan hak milik sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2. Masalah

Prinsip kedua dalam Ekonomi Islam adalah *masalahah*. Penempatan prinsip ini di urutan kedua karena *mashlahah* merupakan konsep yang paling penting dalam *syariah*, sesudah tauhid. *Mashlahah* adalah tujuan *syariah* Islam dan menjadi inti utama *syariah* Islam itu sendiri.

Secara umum, *masalahah* diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan *mudharat*, kerusakan dan *mafsadah*. (*jalb al-naf'y wa daf' al-dharar*). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, *masalahah* adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam *ijtihad* menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyasah iqtishadiyah* (kebijakan ekonomi). *Mashlahah* adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh *syariat*. *Mashlahah* merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan *syariah* (*siyasah syar'iyah*) dalam merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan *muamalah*, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara

syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada *masalahah*. Para ulama menyatakan "*di mana ada masalahah, maka di situ ada syariah Allah*". Ini berarti bahwa segala sesuatu yang mengandung *kemaslahatan* maka di sana ada *syariah* Allah. Dengan demikian, *masalahah* adalah konsep paling utama dalam *syariat* Islam.

3. Adil

Prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Alquran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25). Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik, maupun sosial.

Komitmen Alquran tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti: kata urutan ketiga yang banyak disebut Alquran setelah kata *Allah* dan *'Ilm*. Bahkan, menurut Ali Syariati, dua pertiga ayat-ayat Alquran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lain-lain (Kahduri, *The Islamic Conception of Justice* (1984):10).

Tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakan keadilan sosio ekonomi. Maka, adalah sesuatu yang keliru, klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat adanya tekanan dari kelompok. Secara konkret, misalnya sistem kapitalisme yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai spritual dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat).

Kemanfaatan dari lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini terlihat sangat jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar. Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Maka, untuk mewujudkan

keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan *transfer payment*.

Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini menurut Milton Friedman, terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha, dan para pejabat pajak bersama kelompok-kelompoknya. (Lihat, “*Capitalisme and Freedom*”, Chicago, The University of Chicago Press, 1962, p.172). Konsep sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Alquran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan karena keduanya merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syari’ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor, dan sebagainya.

Aspek Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanya lah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq, sedekah, dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter, misalnya dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidakadilan dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat dan memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk *qardhul hasan*.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengecam konsentrasi aset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep *zakat, infaq, sedeqah, waqaf*, dan institusi lainnya seperti *pajak, jizyah, dharibah*, dan sebagainya.

Alquran dengan tegas mengatakan, “*Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu*” (QS. 59:7), “*Di antara harta mereka terdapat hak*

fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta” (QS. 70:24).

Berdasarkan prinsip ini maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukan lah meningkatkan pertumbuhan menurut konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Islam dan ajarannya menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan *an sich* bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan, dan pemerataan merupakan dua sisi yang tak terpisahkan. Berdasarkan prinsip ini maka paradigma *trickle down effect*, yang dikembangkan pihak Barat dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim Orde Baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (*private ownership*) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumber daya, dan efisiensi. Sistem ini pun selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan seiring.

Sistem ekonomi kapitalis yang bebas nilai pada akhirnya menghasilkan manusia yang tamak, boros, dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, sejumlah pengusaha yang sukses. Di balik keberhasilannya, sistem ekonomi ini telah mengakibatkan banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin terjadi secara tajam. Perusahaan-perusahaan yang lemah akan tersingkir dan tersungkur. Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang (QS. 70:24), bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang. Juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan kerataan pemilikan kekayaan secara kaku.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, bahkan justru dipandang sebagai ketidakadilan. Hal ini menggambarkan bahwa Islam menghargai prestasi, etos kerja, dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas. Dasar dari sikap yang kooperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah *sunnatullah*. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah, “*Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain*”. (QS. 16:71). Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (*dhu'afa*) sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan.

Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Sehingga timbul anggapan di sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya maka ia menjadi Islami.

Pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, bahkan lebih banyak keliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu.

Reaksi Marxisme dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap pemilikan individu. Sedangkan dalam Ekonomi Islam, penegakkan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu (*takaful*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.

4. Khalifah

Dalam doktrin Islam, manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* (wakil Allah) di muka bumi (QS.2:30, 6:165), 35:39). Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual, dan material yang memungkinkannya untuk mengemban misinya dengan efektif. Fungsi *kekhalifahan* manusia adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan *syariah* Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai *khalifah* ia diberi kebebasan dan juga dapat berpikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik (Ar-Ra'd: 11).

Berbeda dengan paradigma kapitalisme, konsep *khalifah* mengangkat manusia ke status terhormat di dalam alam semesta (QS.17:70). Serta memberikan arti dan misi bagi kehidupan, baik laki-laki, maupun wanita. Arti ini diberikan oleh keyakinan bahwa mereka tidak diciptakan dengan sia-sia (QS.3:192, 23:115), tetapi untuk mengemban sebuah misi. *Khalifah* berbuat sesuai ajaran Tuhan dan berfungsi sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Manusia bebas memilih berbagai alternatif penggunaan sumber-sumber ini. Namun karena ia bukan satu-satunya *khalifah*, tetapi masih banyak milyaran lagi *khalifah* dan saudara-saudaranya maka mereka harus memanfaatkan sumber-sumber daya itu secara adil dan efisien sehingga terwujud kesejahteraan (*falah*) yang menjadi tujuan kegiatan ekonomi Islam. Tujuan ini hanya tercapai jika sumber-

sumber daya itu digunakan dengan rasa tanggung jawab dan dalam batas-batas yang digariskan *syariah* dalam simpul *maqashid*.

Konsep *khilafah* juga meniscayakan peranan negara dalam perekonomian. Peran penting tersebut antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi Islam, serta kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam kegiatan bisnis melalui lembaga hisbah. Peran negara dalam perekonomian tidak berarti bahwa Islam menolak mekanisme pasar sepenuhnya. Islam tidak akan intervensi pasar untuk regulasi harga, kecuali jika terjadi distorsi pasar. Intervensi negara pada harga didasarkan pada prinsip *maslahah*, yaitu untuk tujuan-tujuan kebaikan dan keadilan secara menyeluruh. Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara memegang peranan penting untuk tegaknya keadilan dalam ekonomi.

5. Persaudaraan (ukhuwah)

Alquran mengajarkan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian. Alquran mengatakan, "*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal*". (QS.49:13). "*Kami menjadikan kamu dari diri yang satu*", (QS.4:1).

Ayat-ayat ini menjelaskan persamaan martabat sosial semua umat manusia di dunia. Kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "*Semua manusia adalah hamba-hamba Tuhan dan yang paling dicintai di sisiNya adalah mereka yang berbuat baik kepada hamba-hambaNya*". Kriteria untuk menilai seseorang bukan lah bangsa, ras, warna kulit, tetapi tingkat pengabdian, dan ketaqwaanya kepada Allah secara vertikal dan kemanusiaan secara horizontal. Nabi Muhamd SAW mengatakan "*Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain*".

Ajaran Islam sangat kuat menekankan *altruism*, yaitu sikap mementingkan orang lain. Dalam Alquran, *altruisme* diistilahkan dengan *istar* yang termaktub dalam firman Allah, "*Mereka lebih mementingkan orang lain dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesulitan*". Ajaran ini jelas tidak terdapat dalam ekonomi kapitalisme.

Dalam ayat lain, Allah menggambarkan potret muslim sejati adalah mereka yang rela memberikan makanan yang memang ia butuhkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, "*Orang bertaqwa itu memberikan harta yang ia cintai kepada karib-kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin*". Sebagaimana disebut di atas bahwa Islam mengajarkan konsep *al-musawat* (persamaan) di antara sesama manusia. Semua sumber daya alam, flora, dan fauna ditundukkan oleh Allah bagi manusia mana pun sebagai sumber manfaat ekonomis (QS. 6: 142–145, QS.16: 10–16). Di sini tampak jelas, konsep persamaan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Konsep persamaan manusia, menunjukkan bahwa Islam menolak pengklasifikasian manusia yang berdasarkan atas kelas-kelas. Implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara manusia terjalin rasa persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerja sama dalam ekonomi, yakni *syirkah*, *qiradh*, dan *mudharabah* (*profit and lost sharing*). Ini lah yang diterapkan di dalam aktivitas ekonomi mikro di lembaga-lembaga keuangan Islam saat ini seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, obligasi syari'ah, pasar modal syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Dalam konteks ekonomi makro praktik bagi hasil ini diterapkan dalam pinjaman luar negeri, dalam instrumen moneter pemerintah sehingga sistem riba benar-benar dihapuskan dalam seluruh aktivitas ekonomi, baik mikro, maupun makro.

Sikap egalitarian yang dibangun dalam aktivitas ekonomi yang Islami, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang individualistis. Sistem ekonomi kapitalis dibangun atas dasar sebuah konsep yang hanya memberi kemanfaatan kepada pemilik modal, baik itu dengan sistem bunga, atau pun proses mendapatkan keuntungan yang menghalalkan segala cara.

Konsekuensi prinsip ukhuwah adalah niscayanya kerja sama (*cooperaion*) dalam bisnis. *Cooperation* merupakan idealisme interaksi ekonomi. Namun, dalam praktiknya *cooperation* hanya sebatas konsep dan wacana para pemikir ekonomi Islam atau pun berada di dunia ide Plato yang belum hadir dalam tindakan praktik aktual. Secara fakta sering terjadi para pebisnis menggunakan idiom *cooperation*, akan tetapi yang diterapkan di lapangan adalah *competition*. Salah satu contoh yang sederhana adalah dalam penentuan harga. Industri besar yang manajemennya sudah berhasil menekan ongkos produksi, dengan alasan harga pasar melumat lawan-lawannya. Akhirnya, tidak ada pilihan lain bagi industri kecil, kecuali gulung tikar atau diakuisisi industri yang lebih besar.

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang baik kepada orang lain bukan lah sebagaimana yang diajarkan ekonomi kapitalisme. Sebuah perjuangan hidup tidak hanya untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan individu semata, tetapi juga saling berkorban dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan primer saudara seiman yang fakir atau pun miskin. Bagaimanapun para ulama fiqh sepakat, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok orang miskin adalah kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) masyarakat muslim.

Implikasi logis dari prinsip *ukhuwah* adalah bahwa seluruh sumber daya yang disediakan Allah harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan untuk menjamin standar hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap orang. Nabi bersabda, "*Tidaklah beriman seseorang kamu, jika ia makan kenyang sementara tetangganya kelaparan*". Karena sumber daya yang bisa dikuasai manusia terbatas maka untuk mewujudkan filantropi tersebut, seorang muslim harus lah sederhana dalam mengonsumsi sumber daya yang tersedia. Pemenuhan kebutuhan individu harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, tidak boleh ada pemborosan, *mubazzir*, atau

israf. Sesuatu yang sangat disayangkan adalah praktik pemborosan yang telah merajalela di negara muslim sebagaimana di negara-negara kapitalis.

Konsep *ukhuwah* juga berimplikasi pada akhlak dalam bersaing di dalam suatu bisnis. *Ukhuwah* atau *brotherhood* amat relevan untuk menjadi *therapy* bagi *atmosphere* interaksi bisnis yang tercerabut dari persaudaraan dan rentan terhadap ancaman *homo homini lupus* dan *homo economicus*.

Untuk itu lah, ekonomi Islam mengajarkan persaingan yang sehat, "*Fastabiwul khairat*", dengan cara meningkatkan efisiensi, kompetensi, dan bentuk-bentuk kompetisi sehat lainnya. Dalam kaitan ini lah Islam melarang menjelekkan bisnis orang lain untuk memenangkan bisnisnya, demikian pula Islam melarang *bai' 'ala bai akhihi* (membeli apa yang sudah ditawarkan saudaranya). Untuk mewujudkan konsep *ukhuwah* dalam perekonomian, Islam juga mengajarkan dua instrumen utama. *Pertama*, menggalakkan ZISWAF. *Kedua*, eliminasi *riba* dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dalam Islam, zakat bukanlah *charity* (bentuk belas kasihan), tetapi kewajiban mutlak yang melekat pada setiap pemilik harta. Zakat infak, sedeqah, dan hasil wakaf yang diberikan kepada fakir miskin tidak saja sebagai manifestasi tauhid, tetapi juga manifestasi dari persaudaraan yang diajarkan Islam.

Sebagai salah satu contoh pelanggaran terhadap konsep *ukhuwah* sebagai berikut. "Ketika tingkat bunga menaik maka investasi menurun. Untuk menjaga tingkat laba tertentu maka kapitalis menurunkan tingkat upah pekerja, akibatnya terjadi lah pengangguran. Ketika upah diturunkan, terjadi lah eksploitasi atas buruh (pekerja). Pada tataran ini prinsip persaudaraan telah dilanggar".

6. Kerja dan Produktifitas

Dalam Islam bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan, dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Dalam kepustakaan Islam, cukup banyak buku-buku yang menjelaskan secara rinci tentang etos kerja dalam Islam. Dalam pandangan Islam bekerja dipandang sebagai ibadah. Sebuah hadits menyebutkan bahwa bekerja adalah *jihad fi sabilillah*.

Berniat untuk bekerja dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha Allah adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan perbuatan tercela dalam agama Islam. Umar bin Khattab pernah menegur seseorang yang sering duduk berdo'a di mesjid tanpa mau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Umar berkata, "Jangan lah salah seorang kamu duduk di mesjid dan berdo'a, *Ya Allah berilah aku rezeki*". Sedangkan ia tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud perkataan Umar ini adalah bahwa seseorang itu harus bekerja dan berusaha, bukan hanya berdoa saja dengan mengharapkan bantuan orang lain.

Buruh yang bekerja secara manual sangat dipuji dan dihargai Nabi Muhammad SAW, meskipun telapak tangannya kasar. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah mencium tangan orang yang bekerja mencari kayu, yaitu tangan Sa'ad bin Mu'az tatkala melihat tangannya kasar akibat bekerja keras.

Monostisisme dan *asketisisme* dilarang dalam Islam. *Monostisisme* adalah pandangan atau sikap hidup menyendiri di suatu tempat dengan menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat. Tujuannya hanya untuk bertapa tanpa niat untuk melakukan perubahan dan perbaikan masyarakat. Sedangkan *asketisme* adalah pandangan atau sikap hidup keagamaan yang menganggap pantang segala kenikmatan dunia atau dengan penyiksaan diri dalam rangka beribadat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan kebutuhan lain untuk dirinya dan keluarganya lebih baik daripada orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadat, tanpa mencoba berusaha mendapat penghasilan untuk dirinya sendiri. Bekerja adalah hak setiap seorang dan sekaligus sebagai kewajiban.

Menangkap pesan Qurani dan Nabawi mengenai kerja (amal) ini, pengertian wajib lebih mengemuka daripada pengertian hak. Sebab hak boleh dilakukan boleh tidak. Namun, jika dikaitkan dengan tanggung jawab imam (penguasa), pengertian kewajiban sangat relevan. Karena pemerintah (negara) berkewajiban menyediakan kesempatan kerja kepada para individu. Dalam ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktivitas adalah untuk mencapai *tiga sasaran*, yaitu *mencukupi kebutuhan hidup, meraih laba yang wajar, dan menciptakan kemakmuran lingkungan sosial, maupun alamiah*. Ketiga sasaran tersebut harus terwujud secara harmonis. Apabila terjadi sengketa antara pekerja dan pemodal (majikan), Islam menyelesaikannya dengan cara yang baik, yakni ada posisi tawar-menawar antara pekerja yang meminta upah yang cukup untuk hidup keluarganya dan tingkat laba bagi pemodal (majikan) untuk melanjutkan produksinya.

7. Kepemilikan

Dalam kapitalisme yang menganut asas *laissez faire*, hak pemilikan perorangan adalah absolut, tanpa batas. Terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas. Sedangkan dalam Marxisme, hak memiliki hanya untuk kaum proleter yang diwakili oleh kepemimpinan diktator. Distribusi faktor-faktor produksi dan apa yang harus diproduksi, ditetapkan oleh negara. Pendapatan kolektif dan distribusi yang kolektif adalah ajaran utama, sedangkan hubungan-hubungan ekonomi dalam transaksi secara perorangan sangat dibatasi.

Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, dalam Ekonomi Islam, pemilikan hakiki hanya pada Allah. (QS. 24:33). Allah adalah pemilik mutlak (absolut), sedangkan manusia memegang hak milik relatif, artinya manusia hanya lah sebagai penerima titipan, *trustee* (pemegang amanat) yang harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Jadi, menurut Ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumber daya, faktor produksi atau aset produktif hanya lah bersifat titipan dari Allah. Pemilikan manusia atas harta secara absolut bertentangan dengan tauhid karena pemilikan sebenar hanya ada pada Allah semata.

Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan paham kapitalisme yang menganggap harta adalah milik manusia itu sendiri karena manusia yang mengusahakannya sendiri. Untuk itu, menurut paham ini, manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan bebas pula memanfaatkannya, tanpa perlu melihat halal haramnya.

Jika semua sumber daya di alam semesta ini sebagai milik Tuhan maka konsekuensinya adalah setiap individu mempunyai akses yang sama terhadap milik Allah karena seluruh alam ini ditundukkan untuk *kemaslahatan* seluruh manusia. Sedangkan menurut ekonomi konvensional, usaha mendapatkan kekayaan, pemanfaatannya dan penyalurannya, tunduk pada *wants* manusia itu sendiri, tidak tunduk pada ketentuan *syari'at* dan qaidah-qaidah yang ditetapkan Allah.

Pandangan Islam tentang harta (sumber daya) juga berbeda dengan sosialisme yang tidak mengakui pemilikan individu. Semua adalah milik negara. Individu hanya diberikan sebatas yang diperlukan dan bekerja sebatas yang dia bisa. Ekonomi Islam membagi tiga jenis kepemilikan yang harus dibedakan, yakni pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Pemilikan individu diperoleh dari bekerja, warisan, pemberian, hibah, hadiah, wasiat, mahar barang temuan, dan jual beli. Islam melarang memperoleh harta melalui cara yang tidak diridhoi Allah dan merugikan pihak lain seperti *riba*, menipu, jasa pelacuran, perdagangan gelap, produksi, dan penjualan alkohol/miras, narkoba, judi, spekulasi valuta asing, spekulasi di pasar modal, *money game*, korupsi, curang dalam takaran dan timbangan, *ihtikar*, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat dibenarkan memperoleh pendapatan dari aktivitas yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan pemilikan umum adalah barang-barang yang mutlak dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan), minyak, sumber mas dan perak, barang yang tak mungkin dimiliki individu seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, dan sinar matahari.

Pengelolaan milik umum hanya dimungkinkan dilakukan oleh negara untuk seluruh rakyat, dengan cara diberikan cuma-cuma atau harga relatif murah dan terjangkau. Dengan cara ini, rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan cara yang murah yang akhirnya akan membawa dampak pada kesejahteraan rakyat. Jalan tol seharusnya semakin murah dan akhirnya bisa gratis setelah biaya investor dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jalan tol sesungguhnya tidak boleh dibisniskan karena jalan milik umum. Di negara mana pun di dunia ini tarif jalan tol semakin lama semakin murah. Padahal mereka tidak menganut ekonomi Islam secara formal. Di Indonesia, kenyataan berbeda kontras. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam Islam.

Hak milik umum yang telah dikelola oleh negara melalui lembaga atau suatu badan usaha, menjadi hak milik negara. Air, api, rumput, gas, minyak, yang mulanya merupakan hak milik umum, apabila dikelola negara (dinasionalisasi) maka statusnya

menjadi hak milik negara. Tetapi pemanfatannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh, bukan hanya untuk segelintir para pejabat yang menguasai perusahaan BUMN/BUMD tersebut.

Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa menurut ekonomi Islam, hak milik pribadi merupakan prinsip fundamental. Sedangkan hak milik umum merupakan prinsip *tab'an* (pengecualian). Artinya, setiap manusia memiliki hak asasi secara pribadi terhadap segala sumber daya alam, kecuali sumber daya tertentu, seperti sungai, lautan, udara, api, dan sebagainya. Pandangan ini juga sejalan dengan Sayyid Qutub. Menurutnya, hak milik pribadi merupakan pokok (*ashal*), sedangkan hak milik umum merupakan pengecualian. Sejalan dengan itu, Tahawi mengatakan, negara bisa memberikan batasan kepada hak milik perorangan, mengaturnya atau menyitanya sesudah memberikan ganti rugi yang layak.

Siddiqi selanjutnya menuturkan bahwa perorangan (individu), negara dan masyarakat, masing-masing mempunyai klaim (tuntutan) atas hak milik berdasarkan prinsip bahwa negara mempunyai yurisdiksi atas hak-hak perorangan. Yuridiksi ini walaupun bersifat fungsional, tetapi pelaksanaannya tergantung pada tata nilai dan tujuan-tujuan yang diajarkan Islam. Prinsip-prinsip ini membenarkan diadakannya nasionalisasi, pembatasan luas/jumlah, pengawasan harga barang tertentu, dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip di atas maka penyerahan perusahaan minyak, air, tambang emas untuk dikelola pihak asing sesungguhnya bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam Islam. *Block Cepu* misalnya, seharusnya dikelola Pertamina. Jika di Pertamina banyak korupsi sehingga *block Cepu* rugi, solusinya bukan menyerahkan *block Cepu* ke tangan asing, tetapi praktik korupsi di Pertamina yang harus ditumpas. Jika ada tikus di lumbung padi, jangan lumbung padinya yang dibakar, tetapi tikusnya yang diusir dengan siasat dan strategi canggih.

Konsep kepemilikan ini membawa sejumlah implikasi yang sangat penting yang membawa perbedaan revolusioner dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme.

Pertama, bahwa sumber daya diperuntukkan bagi semua orang, bukan untuk sebagian kecil manusia (QS.2: 29). Sumber-sumber daya itu harus digunakan untuk kesejahteraan semua orang secara menyeluruh dan adil. Pemusatan kekayaan di negara-negara kaya secara mencolok adalah realita yang bertentangan dengan keadilan. Demikian pula penguasaan konglomerat atas jutaan hektar hutan atau ratusan ribu hektar perkebunan sehingga terjadi penumpukan aset pada segelintir tertentu, bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam.

Kedua, setiap orang harus memperoleh sumber-sumber daya itu dengan cara yang sah dan halal, bukan cara-cara curang seperti suap dan cara-cara batil lainnya. Firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka rela di antar kamu* (QS.4: 29).

Ketiga, tidak seorang pun berwenang menghancurkan atau memboroskan sumber-sumber daya pemberian Tuhan. Tindakan ini oleh Alquran disamakan dengan *fasad* (kerusakan, kejahatan) yang dilarang Tuhan (QS. 2: 205). Karena itu ketika Abu Bakar, mengirm Yazid bin Sufyan dalam suatu peperangan, ia melarang Yazid membunuh dengan sembarangan atau merusak kehidupan tumbuh-tumbuhan atau binatang sekali pun di daerah musuh.

Jika hal ini tidak diizinkan, sekali pun dalam kondisi perang dan di daerah musuh maka tidak ada alasan untuk mengizinkannya pada saat damai dan di negeri sendiri. Dengan demikian, benar-benar tidak dibolehkan menghancurkan dan memusnahkan barang-barang yang telah diproduksi, sebagai siasat agar harga barang itu tetap tinggi, baik dengan membakar atau membuangny kelautan.

8. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi. Kedua prinsip tersebut, masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi oleh beliau kedua prinsip tersebut digabungkan menjadi satu. Penyatuan ini dilakukan karena kedua prinsip itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat.

Penyatuan ini juga dimaksudkan agar pembaca dengan cepat menangkap pengertian kebebasan dalam kajian ini, sehingga tidak muncul tanda tanya dan kerancuan dalam pikiran tentang makna kebebasan dalam persepektif Islam. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, *pertama*, perspektif teologi dan *kedua*, perspektif *ushul fiqh/falsafah tasyri'*.

Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumber daya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang *masalah* dan *mafsadah* (mana yang manfaat dan *mudharat*).

Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasinya manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Manusia dengan potensi akalnya mengetahui bahwa penebangan hutan secara liar akan menimbulkan dampak banjir dan longsor. Manusia juga tahu bahwa membuang limbah ke sungai yang airnya dibutuhkan masyarakat untuk mencuci dan mandi adalah suatu perbuatan salah yang mengandung *mafsadah* dan *mudharat*. Melakukan *riba* adalah suatu kezaliman besar. Namun, ia melakukannya juga karena ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan Allah karena perbuatan itu dilakukannya atas pilihan bebasnya.

Seandainya manusia berkeyakinan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena dikehendaki Allah secara *jabari* maka tidak logis ia diminta pertanggungjawaban atas penyimpangan perilakunya. Jadi, makna kebebasan dalam konteks ini bukan lah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam faham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak karena kebebasan seperti itu

hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*).

Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kebebasan yang terkendali (*al-hurriyah al-muqayyadah*). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas, tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah - yang dalam Islam- disebut lembaga *hisbah*.

Kebebasan dalam konteks kajian prinsip Ekonomi Islam dimaksudkan sebagai antitesis dari faham *jabariyah (determinisme)*. Faham ini mengajarkan bahwa manusia bertindak dan berperilaku bukan atas dasar kebebasannya (pilihannya) sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Dalam faham ini manusia ibarat wayang yang digerakkan oleh dalang. Determinisme seperti itu, tidak hanya merendahkan harkat manusia, tetapi juga menafikan tanggung jawab manusia. Tidak logis manusia diminta tanggung jawabnya, sementara ia melakukannya secara *ijbari* (terpaksa).

Pengertian kebebasan dalam perspektif *ushul fiqh* berarti bahwa dalam *muamalah* Islam membuka pintu seluas-luasnya ketika manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaedah, pada dasarnya dalam *muamalah* segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.

Bila diterjemahkan arti kebebasan bertanggung jawab ini ke dalam dunia bisnis, khususnya perusahaan maka kita akan mendapatkan bahwa Islam benar-benar memacu ummatnya untuk melakukan inovasi apa saja, termasuk pengembangan teknologi dan diversifikasi produk.

9. Jaminan Sosial

Penjelasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa Islam menuntut kepada setiap orang yang mampu untuk bekerja dan bersungguh-sungguh dalam kerjanya, sehingga ia dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Namun demikian, beberapa anggota masyarakat ada yang tidak mampu bekerja, sehingga mereka tidak berpenghasilan. Ada juga yang mampu bekerja, tetapi tidak mendapatkan lapangan kerja sebagai sumber penghasilan mereka dan pemerintah sendiri tidak mampu untuk mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai bagi mereka.

Ada pula yang sebenarnya sudah bekerja, hanya saja pemasukan mereka belum mencukupi standar yang layak karena sedikitnya pemasukan (*income*) atau banyaknya keluarga yang ditanggung atau mahalnya harga barang atau karena sebab-sebab yang lain. Untuk mengatasi problem tersebut Islam mengajarkan *takaful al-ijtima'iy* (jaminan sosial), melalui instrumen zakat, infak, sedeqah, dan wakaf. Secara hukum dan moral negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Negara pada dasarnya bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap masyarakatnya dan kewajibannya adalah meringankan dan menghapus penderitaan rakyatnya. Dengan kata

lain, negara hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat secara individu apabila individu itu tidak mampu memperoleh kebutuhan pokok tersebut dengan usahanya sendiri, tetapi dalam keadaan apa pun, negara tidak memberikan "ikan" sepenuhnya sehingga masyarakat menjadi tidak produktif. Jelas bahwa sistem Islam tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.

10. Nubuwwah

Prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah *nubuwwah* yang berarti kenabian. Prinsip *nubuwwah* dalam Ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan *syariah* Allah SWT kepada umat manusia.

Prinsip *nubuwwah* juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Untuk itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan sekaligus sebagai teladan kehidupan (Al-Ahzab: 21). Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah, dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada empat, yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fatamah*.

a. ***Siddiq***, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi.

Pada zamannya, ia menjadi pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair, dan sehat sehingga ia digelar sebagai al-Amin. Ia tak segan-segan menyosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan *statement* yang tegas kepada para pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, perangkat hukum beserta *reward* dan *punishment* benar-benar ditegakkan kepada para pelaku bisnis yang tidak jujur/benar.

Shiddiq dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dua prinsip yang oleh Peter Drucker merupakan indikator kesuksesan sebuah perusahaan.

Dalam dunia perbankan, lembaga keuangan dan bisnis *syariah* saat ini prinsip *shiddiq*, mestinya menjadi sesuatu yang membedakan LKS dan bisnis *syariah* dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional, manakala bisnis dalam *syariah* dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan harta dan dana masyarakat dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat larangan (*haram*).

b. ***Amanah***, berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas, dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi *syariah* dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. Dengan

demikian, setiap pelaku ekonomi Islam mesti lah menjadi orang yang profesional dan bertanggung jawab sehingga ia dipercaya oleh masyarakat dan seluruh pelanggan.

Dalam dunia perbankan dan LKS yang berkembang saat ini sifat *amanah* menjadi kunci sukses ekonomi *syariah* di masa depan. Jika pelaku ekonomi *syariah* saat ini menciderai gerakan ekonomi *syariah* dengan sifat dan praktik non-*amanah* (seperti tidak profesional, tidak bertanggung jawab, dan tidak kredibel maka seluruh masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang bernama ”*syariah*” tersebut.

- c. **Tablig**, adalah komunikatif, dan transparan, dana pemasaran yang kontinyu. Para pelaku ekonomi *syariah* harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi *syariah*. Dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan. Demikian pula dalam melakukan pemasaran, sosialisasi dan edukasi harus berkesinambungan. Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip *syariah* semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan *syariah*. Tabligh juga berarti bahwa pengelolaan dana dan keuntungannya harus dilakukan secara transparan dalam batas-batas yang tidak mengganggu kerahasiaan bank.
- d. **Fathonah**, berarti kecerdasan dan intelektualitas *fathanah* mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, *skills*, jujur, benar, kredibel, dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dia jalankan efektif dan efisien serta bisa memenangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan. Dalam dunia bisnis, sifat *fatanah* memastikan bahwa pengelolaan bisnis, perbankan, atau lembaga bisnis apa saja harus dilakukan secara *smart* dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang rendah.

Untuk mengakhiri topik ini maka berikut akan disampaikan mengenai intisari dari perbedaan antara sistem Ekonomi Islam dengan sistem Ekonomi Kapitalis:

Tabel 1.3.
Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalisme

Aspek	Islam	Kapitalisme
Sumber Ide/pemikiran	Allah	Manusia
Sumber	<i>Alquran</i> dan <i>Hadits</i>	Daya Pikir Manusia
Motif	Ibadah	<i>Rasional materialisme</i>
Paradigma	<i>Syariah</i>	Pasar
Tujuan	<i>Falah</i> dan <i>Maslahat</i>	<i>Utilitarian, individualisme</i>

Aspek	Islam	Kapitalisme
Filosofi Operasional	Keadilan, kebersamaan, dan tanggung Jawab.	Liberalisme, <i>Laissez Faire</i>
Kepemilikan harta	Milik absolut pada Allah, manusia adalah penerima amanah, pemilik relatif.	Hak milik absolut pada manusia
Sistem Investasi	PLS	Bunga
Sistem Distribusi	Mekanisme pasar dengan nilai2 (termasuk <i>zakat, infak, sedekah, wakaf</i>)	Sistem Pasar
Prinsip Jual beli	Melarang <i>gharar, maysir, riba</i> , dan barang-barang <i>haram</i>	Tidak ada larangan
Motif Konsumsi	Kebutuhan	Keinginan
Tujuan Konsumsi	<i>Kemaslahatan</i>	Memaksimalkan utility
Motif untuk Produksi	Kebutuhan dan kewajiban manusia	Ego dan rasionalisme
Hubungan antar pelaku bisnis sejenis	Ukhuwah	Persaingan
Perputaran Uang	<i>Real based</i> ekonomi	<i>Monetary based</i> ekonomi
Keterkaitan sektor riil dan moneter	Sangat terkait satu dan lainnya	Terpisah
Instrumen Moneter	Bagi hasil, jual beli, <i>ijarah</i>	Riba
Indikator keberhasilan ekonomi	Pertumbuhan dan pemerataan	Pertumbuhan ekonomi
Prinsip Pengeluaran	Berdasarkan 3 tingkatan <i>mashlahah (Dharuriah, Tahsiniah, dan Hajjiah)</i>	Tidak memperhatikan prioritas <i>mashlahah</i>
Sumber keuangan negara	<i>Zakat, infak, sedekah, usyr, dharibah, kharaj</i> , pajak kondisional.	Pajak
Sasaran Penerima	Pada <i>zakat</i> ditentukan 8 <i>ashnaf</i> .	Tanpa melihat <i>ashnaf</i>
Tujuan Pembangunan	Memprioritaskan pengentasan kemiskinan.	Kemajuan semata
Dampak	Sarana menciptakan keadilan ekonomi.	Kesenjangan

Landasan filosofis ini lah yang membedakan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah.

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. *Pertama*, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang

amanah (*trustee*) untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.

Salah satu contoh praktik ekonomi saat ini yang bertentangan dengan Tauhid adalah bunga. Bunga (*interest*) yang memastikan usaha harus berhasil (untung) bertentangan dengan tauhid. Firman Allah, “*Seseorang tidak bisa memastikan berapa keuntungannya besok*”, (Ar-Rum: 41). Padahal setiap usaha mengandung tiga kemungkinan, yaitu untung, impas, atau rugi. Lebih dari itu, tingkat keuntungan itu pun bisa berbeda-beda, bisa besar, sedang atau kecil. Jadi, konsep bunga benar-benar tidak sesuai dengan *syariah*, karena bertentangan dengan prinsip tauhid.

Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai *khalifah*, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya, sebagaimana dalam firmanNya “*Dan jika kamu menghitung – hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya*”. (QS. 14: 34)

Berbeda dengan pandangan di atas, para ahli ekonomi konvensional selalu mengemukakan jargon bahwa sumber daya alam terbatas (*limited*). Karena itu, menurut Ekonomi Islam, krisis ekonomi yang dialami suatu negara, bukan karena terbatasnya sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi (*maldistribution*) sehingga terwujud ketidakadilan sumber daya (ekonomi).



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakan lah latihan berikut!

- 1) *Syariah* Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan *muamalah*. Jelaskan tentang kedua hal tersebut!
- 2) Jelaskan tentang tauhid dalam konteks ekonomi!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan filsafat Ekonomi Makro Islam. (halaman 1.79)

Syariah Islam terbagi dua, yaitu ibadah dan *muamalah*. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *khaliq*-Nya. *Muamalat* dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber *Alquran* dan *Hadits*. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi,

seperti prinsip tauhid, adil, *maslahat*, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya.

2) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan filsafat Ekonomi Makro Islam. (1.73)

Landasan filosofis ini lah yang membedakan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah.



Rangkuman

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya.

Filsafat Ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*: yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat Ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Dimensi filsafat Ekonomi Islam ini lah yang membedakan Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya Kapitalisme dan Sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan.

Sebagai disebut di atas, bahwa salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri atas nilai-nilai dan tujuan. Dalam Ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber *Alquran* dan *Hadits* berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai ini lah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam.

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada fondasi utama, yaitu tauhid. Fondasi berikutnya, adalah *syariah* dan akhlak. Pengamalan *syariah* dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi *syariah* dan akhlak terganggu.

Dasar *syariah* membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah *syariah*. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang *good corporate governance* dan *market diciplin* yang baik.



Tes Formatif 3

Pilih lah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*: yakni
 - A. filsafat ekonomi, sosial, dan budaya
 - B. filsafat Tuhan, manusia, dan benda
 - C. filsafat agama, manusia, dan alam
 - D. filsafat Tuhan, manusia, dan alam

- 2) Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikan *masalahah* sebagai
 - A. segala sesuatu yang dapat dipercaya, profesional, kredibilitas, dan bertanggung jawab
 - B. segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan *mudharat*, kerusakan dan *mafsadah*
 - C. segala sesuatu tentang keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan
 - D. segala hal yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat secara individu

- 3) Paradigma, yang dikembangkan pihak Barat dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim Orde Baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam
 - A. *tricle down effect*
 - B. *rule of game*
 - C. *tricle up effect*
 - D. *good corporate governance*

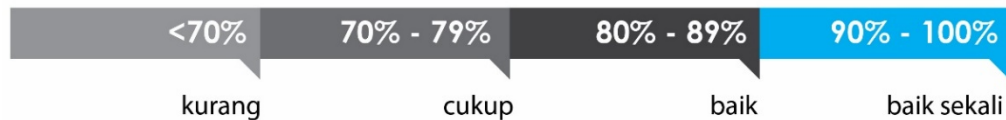
- 4) Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas
 - A. konsep sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme
 - B. konsep transaksi bisnis yang fair, dan sehat
 - C. konsep persaudaraan universal sesama manusia
 - D. konsep nilai-nilai instrumental

- 5) Fondasi utama seluruh ajaran Islam adalah
- A. *ukhuwah*
 - B. *nubuwwah*
 - C. *tauhid*
 - D. *masalah*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A Al-Qur'an dan As-sunnah
- 2) B Identitas
- 3) B Adanya sumber daya langka, tetapi tidak mempunyai alternatif penggunaan
- 4) C Umer Chapra
- 5) A Adanya uang dalam ekonomi makro, sehingga *nominal price* menjadi faktor kajian penting dan adanya pembeli dan penjual raksasa dalam ekonomi makro yaitu pemerintah

Tes Formatif 2

- 1) C Sistem akidah, sistem akhlaq (etika) dan hukum
- 2) D Masalah deflasi
- 3) C Memprediksi keadaan perekonomian dimasa yang lalu
- 4) A Variabel endogen dan variabel eksogen
- 5) A Pendapatan nasional

Tes Formatif 3

- 1) D Filsafat Tuhan, manusia dan alam
- 2) B Segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah
- 3) A *Trickle down effect*
- 4) C Konsep persaudaraan universal sesama manusia
- 5) C Tauhid

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. *Politik ekonomi Islam*. Al-Izzah.
- Chamid, M.D. (2011). *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M.U. (2001). *The future of economics: An Islamic perspective, terj.* Jakarta: SEBI.
- Deliarnov. (2005). *Perkembangan pemikiran ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2002). *Islam untuk disiplin ilmu ekonomi*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dimiyati, A. (2007). Ekonomi etis: Paradigma baru ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. 1(2), 155.
- Siti, N.F.M. (2014). *Pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ari, S.M. (t.thn.). *Teori ekonomi mikro I*. 1.2.
- Nur, C.M. (2010). *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainul, A.M. (2009). *Dasar-dasar manajemen syariah. Cetakan 7*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Eko, S. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan ekonomi makro Islam dan konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar ilmu ekonomi makro. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haadurat, A.I. (2013). Pengaruh karakteristik perusahaan dan ekonomi makro terhadap return saham syariah yang listing di Jakarta Islamic Index. *Manajemen dan Bisnis*, 120.

- Jonaidi, A. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. *Kajian Ekonomi*. 1 (1), 141.
- Karim, A. (2003). *Ekonomi mikro Islami* Ed. II. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Mannan. (1970). *Islamic economics, theory and practice*. Delhi: Sh. M. Ashraf.
- Masdjoko, G. N. (2005). *Analisis fenomena moneter neraca pembayaran Indonesia: Suatu studi tentang faktor-faktor yang memengaruhi Periode 1980-2003*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mustafa, E.N. (2006). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Naf'an. (2013). *Ekonomi makro tinjauan ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, M.E. (2004). Beberapa pemikiran tentang keuangan publik Islam. *Jurnal Mini Economica*. Edisi 34.
- Nurlaili, S.F. (2014). Konsep dasar ekonomi Islam. Maqashid Al-Syari'ah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. Dalam *P3EI, 2013, hal. 5* (hal. 10). Jakarta: STIE SEBI.
- Nurul, H., & dkk. (2008). *Ekonomi makro Islam: Pendekatan teoretis*. Jakarta: Kencana.
- Nurul, H. (2008). *Ekonomi makro Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Paul, A.S., & William, D.N. (1989). *Ekonomi - jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.
- Pindyck, R.S., & Daniel, L.R. (2001). *Microeconomics* 5th Ed. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Soediyono, R. (2000). *Pengantar ekonomi makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Soeharno. (2007). *Teori mikro ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Reksoprayitno, S. (2000). Ekonomi makro analisis Is-LM dan permintaan-penawaran agregatif. Edisi Millennium. Cetakan Pertama. Dalam A. W. Hague, *A Textbook Of Economic Theory*. Yogyakarta: BPFE.

Sadono, S. (2000). *Makro ekonomi modern: Perkembangan pemikiran dari klasik hingga Keynesian baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saud, M.A. (1996). *Garis-garis besar ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Soeretro. (2000). *Ekonomi makro pengantar*. Edisi Ke-1 Cetakan Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sukirno, S. (2011). *Makro ekonomi teori pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.

Umer, C. (2000). *Sistem moneter Islam*, diterjemahkan oleh Iwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.

WEBSITE:

<http://gado-lado.blogspot.com/2013/01/makroekonomi-bab-i-analisis-makroekonomi.html>.

<http://woocara.blogspot.com/2015/04/perbedaan-ekonomi-mikro-dan-makro.html#ixzz44Ck30ddK>